

Laporan Akhir

RENCANA STRATEGIS

Badan Pelaksana Otorita

Labuan Bajo - Flores

2021 - 2030

Hak Cipta© Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLB-F)

Dilarang memperbanyak/mengcopy sebagian atau keseluruhan isi laporan dalam bentuk apapun tanpa seizin dari BPOLB-F. Setiap data, hasil analisis, dan lainnya yang diambil dari laporan ini untuk kebutuhan publikasi lain, harus menggunakan kutipan bersumber.

DISCLAIMER

Peristilahan yang digunakan dan penyajian materi dalam laporan ini mewakili pendapat dari Tim Penyusun Laporan Rencana Strategis Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo- Flores.

Segala saran dan masukan, dapat dikirimkan kepada :

Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia

Jl. Tambak No.21, Pengangsaan
Menteng - Jakarta Pusat 10320

LAPORAN AKHIR

**Rencana Strategis
Badan Pelaksana Otorita
Labuan Bajo, Flores**



FOTO Komodo

Sumber Foto : www.wallpapermaiden.com

A close-up photograph of a Komodo dragon's head, split vertically into two panels. The left panel shows the dragon's head in profile, facing left, with its long, pink tongue extended. The right panel shows the dragon's head from a slightly different angle, also facing left, with its tongue retracted. The dragon's skin is covered in large, scaly scales. The background is a blurred green field.

2030
BPO-LBF PLAN



DAFTAR ISI



DAFTAR ISI. i

BAB I : PENDAHULUAN. 1

1.1 Latar Belakang.	1
1.1.1 Memorandum Of Understanding /Nota Kesepahaman Dan Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo - Flores (BPOLB-F) Dengan Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia	1
1.1.2 Kerjasama Pemerintah & Organisasi Masyarakat	5
1.2 Pengertian Rencana Strategis BPOLB-F	6
1.3 Maksud, Tujuan, Sasaran	6
1.4 Manfaat Rencana Strategis BPOLB-F	7
1.5 Ruang Lingkup Kegiatan	8
1.6 Sistematika Laporan Akhir	10

BAB II : KONDISI UMUM BADAN PELAKSANA OTORITAS LABUAN BAJO-FLORES 11

2.1 Kajian Literatur.	11
2.1.1 Badan Otorita	11
2.1.2 Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	14
2.1.3 Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata	16
2.1.4 Tourism Planning dan Strategic Plan Benchmarking BPOLB-F Hingga Saat Ini.	17
2.2 Organisasi BPOLBF	24
2.2.1 Tugas dan Fungsi BPOLBF	25
2.2.2 Mandat Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo – Flores	25
2.2.3 Susunan Organisasi BPOLB-F	26
2.2.4 BPOLBF Hingga Saat Ini	29
2.3 Kajian Peraturan.	30
2.3.1 Dasar Hukum Pembentukan BPOLB-F.	30
2.3.2 Dasar Hukum Penyusunan Renstra BPOLB-F.	30

BAB III : ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI LABUAN BAJO, FLORES 13

3.1 Dinamika Global	32
3.1.1 Inovasi Pariwisata	34
3.1.2 Stabilitas Politik	34
3.1.3 Trend Pariwisata Pada Masa Pandemi COVID-19	34
3.2 Kelembagaan	36
3.3 Lingkungan Hidup.	37
3.4 Sosial Budaya	38
3.5 Arahkan Direktif	41
3.6 Potensi dan Tantangan BPOLB-F dalam Pengembangan Pariwisata.	44
3.6.1 BPOPLB-F dengan Potensinya	44
3.6.2 BPOP LBF dan Tantangan Pengembangannya.	45

BAB IV : MUATAN RENSTRA BPOLB-F 2021-2030 47

4.1 Arahkan RPJMN 2020-2024	51
4.2 Arahkan Renstra Kementerian Pariwisata 2020-2024	55
4.3 Sasaran Program BPOLBF	55
4.4 Proses Bisnis.	57
4. 5 Kerangka Kelambagaan	58

BAB V : QUICK WINS RENCANA AKSI 60

BAB VI : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN. 63



#1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Dibentuknya Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menunjukkan keseriusan dan fokus pemerintah untuk mengembangkan pariwisata Labuan Bajo dan Flores secara keseluruhan. Apalagi target pemerintah untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata berkelas dunia menuntut perencanaan dan pemograman kegiatan pengembangan yang sistematis.

Mencermati pentingnya peran dan program strategis organisasi dalam mengelola pengembangan pariwisata di Labuan Bajo dan Flores, maka sebagai Badan Pelaksana, BPOLBF memerlukan suatu rencana strategis (renstra) organisasi untuk dapat menentukan program dan aksi yang sistematis dalam mewujudkan visi menjadi destinasi wisata premium dan meningkatkan devisa negara melalui sektor pariwisata, serta memajukan ekonomi masyarakat Flores dan NTT pada umumnya.

1.1.1. *Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama* antara Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo - Flores (BPOLBF) dengan Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia

a. Nota Kesepahaman

Atas dasar hubungan *profesionalisme* antara BPOLBF sebagai pihak yang memiliki kewenangan, tugas pokok dan fungsinya untuk pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores serta IAP sebagai wadah tunggal Ahli Perencanaan yang ada di Indonesia maka kedua pihak bersepakat untuk mengadakan penandatanganan MoU tentang Peningkatan Kapasitas Perencanaan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores yang tertuang dalam Nota Kesepahaman No. 04/NKPKPK/BPOLBF/IX/2020 - PN.IAP/MOU/01/VII/2020 dengan lingkup sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perencanaan kepariwisataan Labuan Bajo Flores, termasuk mengembangkan model-model praktik perencanaan kepariwisataan yang integratif, terukur dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik Labuan Bajo Flores;
2. Pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang perencanaan kepariwisataan;
3. Sosialisasi dan edukasi kepada *stakeholders* Labuan Bajo Flores untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang partisipatif dan akuntabel;

Rencana Strategis BPOLB-F 2021-2030

4. Pendampingan teknis perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, sesuai kebutuhan termasuk terhadap pertimbangan/pendapat keahlian dalam perumusan kebijakan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
5. Kajian dan pengembangan standar pedoman dan kriteria dalam bidang perencanaan kepariwisataan yang mendukung pembangunan Labuan Bajo Flores;
6. Program lain yang dibutuhkan untuk mendukung perbaikan penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores; dan/atau
7. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.



b. Perjanjian Kerjasama Rencana Strategis

Dari ke-7 (tujuh) lingkup dalam nota kesepahaman di atas, kedua pihak menindaklanjuti nota kerjasama tersebut dengan terwujudnya Perjanjian Kerjasama nomor 04a/PKS/Renstra/PL/PPK/BOPLBF/VIII/2020 tentang **PENGADAAN SWAKELOLA TYPE 3 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN OTORITA PARIWISATA LABUAN BAJO FLORES TAHUN 2021 – 2026**. Dengan lingkup kerjasama sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan dan pengumpulan data yang diperlukan
2. *Peer Review* terhadap kegiatan dan kebijakan perencanaan terkait
3. *Collaborative Planning Workshop*
4. Diskusi dan konsultasi dengan stakeholders terkait
5. Menyusun dokumen materi teknis rencana strategis Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
6. Dokumentasi dan Publikasi terkait kegiatan yang dapat disebarluaskan kepada mitra strategis
7. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.



c. Peranan antar-pihak dalam Perjanjian Kerjasama penyusunan Rencana Strategis BPOLBF

Sesuai dengan Nota Kesepahaman dan Nota Kerjasama antara BPOLBF dengan IAP, pembagian peranan menjadi hal yang penting untuk diketahui sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Strategis BPOLBF ini sekaligus memperjelas langkah-langkah penyelesaian kegiatan ke depan. Adapun peranan antar-lembaga terdiri dari:

1. BPOLBF

- Melibatkan IAP untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program kerja yang dimaksud;
- Mendapatkan semua jenis laporan dan dokumen dari pelaksanaan program kerja berdasarkan nota perjanjian kerja sama ini; .
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan oleh IAP;
- Memberikan informasi, data, serta pengetahuan terkait penyusunan Rencana Strategis BPOLBF sesuai dengan tugas pokok dan fungsi IAP pada nota kesepahaman;
- Memfasilitasi (fasilitator) pelaksanaan program kerja yang akan dilakukan IAP.

2. IAP

- Mendapatkan informasi, data, serta pengetahuan terkait penyusunan Rencana Strategis BPOLBF sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- Menerima dukungan dan fasilitasi dari BPOLBF sebagai Fasilitator selama pelaksanaan program kerja penyusunan Rencana Strategis ini;
- Melaksanakan program kerja berdasarkan nota perjanjian kerja sama dan Kerangka Acuan Kerja, meliputi persiapan, kajian kepustakaan, survey instansional, analisa, perumusan kebijakan dan strategi, serta penentuan target dan indikator evaluasinya ;
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan program kerja; dan
- Memberikan laporan dan semua hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan.

1.1.2. Kerjasama Pemerintah dan Organisasi Masyarakat

“Organisasi Kemasyarakatan di dalamnya termasuk IAP, dengan demikian, bisa menjadi co-creator yang aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan program-program Pemerintah.”

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 disusun dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, sederhana, memberikan value for money, mudah dikontrol dan diawasi sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi.

Salah satu perubahan yang signifikan dari Perpres 16/18 ini adalah dengan diberikannya payung hukum keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yakni Yayasan dan Perkumpulan, dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah, yakni melalui swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas Pelaksana Swakelola.

Pengaturan terkait Ormas sebagai Pelaksana Swakelola dipandang perlu dengan pertimbangan bahwa terdapat kebutuhan Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan/program dengan melibatkan Ormas yang memiliki kompetensi dan jangkauan luas dalam pelaksanaan kegiatan/program Pemerintah. Kehadiran Ormas sebagai Pelaksana ini dapat mengisi gap kebutuhan barang/jasa Pemerintah yang tidak dapat disediakan oleh Pelaku Usaha atau melalui tipe swakelola lainnya. Paradigma baru dalam pembangunan ini mendukung Ormas mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan sekaligus dapat menguatkan kapasitas dan keberdayaan mereka. Organisasi Kemasyarakatan di dalamnya termasuk IAP, dengan demikian, bisa menjadi co-creator yang aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan program-program Pemerintah.

1.2 Pengertian Rencana Strategis BPOLBF

“fokus utama Rencana Strategis ini adalah menyusun peta jalan (road map) yang berisikan serangkaian kegiatan untuk mendorong dan memastikan keterpaduan, sinergisitas, dan koherensi program pembangunan pariwisata Labuan Bajo Flores”

Rencana strategis BPOLBF adalah kerangka kerja bersama (*blue print*) unit kerja di lingkungan BPOLBF dan rujukan bagi stakeholder pembangunan wisata di Labuan Bajo Flores dalam bekerja sama dengan BPOLBF. Oleh karena itu, fokus utama Renstra adalah menyusun peta jalan (*road map*) yang berisikan serangkaian kegiatan untuk mendorong dan memastikan keterpaduan, sinergisitas, dan koherensi program pembangunan pariwisata Labuan Bajo Flores.

Buku Renstra BPOLBF ini diharapkan tidak hanya menjadi rujukan internal, namun juga Kementerian Pariwisata dan kementerian/lembaga terkait yang mendukung pengembangan Labuan Bajo Flores ini, serta pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota di lingkungan Provinsi NTT.



1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan ini adalah merumuskan rencana strategis pengembangan BPOLBF yang dapat menjadi kerangka kerja bersama unit kerja di lingkungan BPOLBF dengan Kementerian terkait dan rujukan bersama stakeholder pembangunan pariwisata Labuan Bajo Flores.

Tujuan kegiatan ini adalah menyusun rencana strategis BPOLBF yang sistematis, tajam, terpadu, dan koheren.

Sasaran dari kegiatan ini adalah

- Terpetakannya permasalahan pokok yang dihadapi oleh BPOLBF maupun pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pembangunan kepariwisataan
- Terumuskannya rencana pembangunan kepariwisataan dalam 10 tahun ke depan
- Tersusunnya daftar kebutuhan program dan kegiatan pembangunan yang dibutuhkan dalam 5 (lima) tahun ke depan
- Teridentifikasinya *output* dan target pencapaian kegiatan pembangunan kepariwisataan
- Tersusunnya indikator keberhasilan program sebagai dasar monitoring dan evaluasi ke depan

1.4 Manfaat Rencana Strategis BPOLB-F

Hasil kegiatan ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

BPOLBF	Pemerintah Daerah	Kalangan Dunia Usaha
- Menurunkan kebijakan pembangunan kepariwisataan Labuan Bajo Flores yang diamanatkan dalam rpjmn maupun kebijakan kementerian pariwisata dan kementerian/lembaga terkait	- Mensinkronkan rencana pembangunan infrastruktur serta program dan rencana anggaran daerahnya dengan rencana strategis pengembangan pariwisata	- Memperoleh informasi yang utuh dan lengkap tentang pengembangan kepariwisataan Labuan Bajo Flores
- Melakukan program keterpaduan dan keberlanjutan pengelolaan pembangunan kepariwisataan	- Melaksanakan program kerja sama antar daerah, apabila pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata yang bersifat lintas wilayah	- Mendapatkan kepastian informasi pembangunan infrastruktur pendukung wisata, terkait dengan rencana investasi

BPOLBF	Pemerintah Daerah	Kalangan Dunia Usaha
- Mengkoordinasikan dan memformulasikan strategi percepatan realisasi pembangunan kepariwisataan Labuan Bajo Flores dengan kementerian dan pemerintah daerah terkait	- Memfasilitasi perusahaan/ masyarakat yang memiliki minat investasi dalam pembangunan jasa kepariwisataan dan kelompok sadar wisata	- Mengetahui rujukan dalam strategi pembangunan kepariwisataan
- Menyusun standar pengelolaan organisasi dan pemograman.		
- Memfasilitasi minat investasi dalam pembangunan kepariwisataan Labuan Bajo Flores		
- Memberikan panduan dalam hal pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan pembangunan kepariwisataan ke pemerintah daerah di Provinsi NTT		
- Mengevaluasi peraturan pendukung saat ini dan dasar menyusun peraturan pendukung yang baru		

1.5 Ruang Lingkup Kegiatan

Tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini:

a. Persiapan

Kegiatan ini terdiri dari penyusunan metodologi kegiatan, pembuatan jadwal dan pengorganisasian kegiatan, penentuan rancangan workshop, pelaporan, dan persiapan pelaksanaan kegiatan survey instansional di pusat dan daerah

b. Studi literatur mengenai pembangunan kepariwisataan

Kegiatan ini adalah kompilasi berbagai bentuk kelembagaan pembangunan wisata baik secara global dan nasional yang digunakan sebagai data dalam studi literatur ini. Rujukan yang digunakan antara lain UN-WTO maupun UNESCO. Sedangkan di tingkat nasional, seperti RPJPN, RPJMN, RTRWN, Renstra Kementerian Pariwisata dan K/L terkait. Hasil kompilasi ini kemudian dianalisis agar nantinya digunakan sebagai bahan analisis kebutuhan organisasi (*need assessment*).

c. Survey Instansional

Kegiatan survey lapangan ini terdiri dari dua materi utama, yaitu 1) pendataan kondisi pemograman pariwisata baik di K/L maupun di daerah, 2) kajian kelembagaan BPOLBF saat ini, dan 3) identifikasi *best practices* pengelolaan wisata. Tahapan atau langkah-langkah yang termasuk dalam kegiatan survey lapangan ini adalah wawancara dan survey instansional dengan pemerintah maupun stakeholder terkait pelaku usaha pariwisata maupun kelompok masyarakat

d. Analisis pengembangan pariwisata Labuan Bajo Flores, yang meliputi analisis pohon masalah (root cause analysis) tentang pengelolaan pembangunan pariwisata di Indonesia, analisis gap (gap analysis) antara target RPJMN maupun Renstra Kementerian Pariwisata dengan kondisi saat ini, dan analisis kebutuhan (*need assesment*) pembangunan wisata dengan agenda pembangunan global.

e. Penyusunan Rencana Strategis 10 tahun ke depan. Tahapan ini meliputi analisis terhadap kebutuhan pengelolaan destinasi wisata secara terpadu, visi dan misi, strategi dan program pembangunan kepariwisataan.

f. Perumusan target dan indikator evaluasi program BPOLBF

Kegiatan ini untuk merumuskan tolok ukur pemograman dari aspek keterpaduan internal dan eksternal pembangunan kepariwisataan, dan kerja sama dengan stakeholder pembangunan lainnya.

g. Penyelenggaraan Workshop Kolaboratif (*Planning Charette*)

Pengelolaan pengetahuan dan informasi yang bersumber dari persepsi dan opini stakeholder ini dilakukan melalui mekanisme *Planning Charette* dengan dua tahap: 1. Workshop Para perencana profesional dengan 4 (empat) kelompok target grup, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dan pengusaha wisata di Labuan Bajo. 2. Workshop perumusan pokok-pokok renstra oleh internal para perencana pariwisata. Diharapkan dari pertemuan tersebut, dapat diperoleh informasi terkait pengalaman pembangunan wisata atau pengintegrasian pembangunan wisata dengan sektor lainnya.

h. Sosialisasi Kegiatan

Kegiatan ini merupakan pelaporan seluruh hasil kegiatan, terutama dalam hal pokok-pokok kegiatan renstra dilengkapi dengan outcome dan output serta indikator performanya.

1.6 Sistematika Pelaporan

Adapun keluaran dari kegiatan ini terdiri dari,:

- a. **Bab I** berisi latar belakang kegiatan ini dilakukan
- b. **Bab II** berisi kondisi umum penyelenggaraan BPOLBF beserta tinjauan teoritis dan peraturan
- c. **Bab III** berisi tentang isu strategis yang mendasari perencanaan strategis kelembagaan BPOLBF
- d. **Bab IV** berisi muatan renstra BPOLBF yang meliputi arahan RPJMN dan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta arah kebijakan BPOLBF periode 2021-2026
- e. **Bab V** berisi rencana aksi dan program untuk mengatasi isu strategi BPOLBF
- f. **Bab VI** berisi kerangka kegiatan beserta pendanaannya.



#2

KONDISI UMUM BPOLB-F



2.1. KAJIAN LITERATUR

2.1.1. Badan Otorita

Badan otorita merupakan badan layanan umum yang dirancang sebagai lembaga khusus untuk mempercepat pengembangan pariwisata. Badan otorita pariwisata sendiri merupakan lembaga non-kementerian yang berada langsung di bawah Presiden dan Kepala Badan merupakan Pejabat Pengguna Anggaran sehingga BOP memiliki anggaran tersendiri. BOP juga memiliki hak pengelolaan lahan dan berkewajiban memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atas tanah dalam kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya Badan Otorita Pariwisata (BOP) diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pariwisata yang komprehensif. Karena pada dasarnya peningkatan pariwisata itu sendiri membutuhkan suatu kepastian model pengelolaan pariwisata dan *best practices* tata kelola pariwisata yang diwujudkan dalam bentuk pembentukan BOP. Pembentukan BOP secara langsung dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih (overlap) kebijakan serta mempercepat pembangunan dan pengembangan pariwisata Indonesia.

A. Dasar Pembentukan BOP Labuhan Bajo Flores

Pembentukan BOP Labuhan Bajo Flores bertujuan untuk pengupayaan peningkatan kunjungan wisatawan ke Manggarai Barat khususnya ke Taman Nasional (TN) Komodo dan destinasi wisata lainnya baik di kabupaten Manggarai Barat sendiri maupun di kabupaten lain di pulau Flores dan NTT. Pembentukan BOP juga secara langsung memberi 'pekerjaan rumah' bagi pemerintah daerah, pengelola TN Komodo dan pelaku wisata setempat untuk memperkuat pembangunan pariwisata setempat

Labuhan bajo merupakan salah satu dari sekian banyak potret gambaran wajah Indonesia yang dapat di tawarkan pada dunia internasional. Keragaman budaya, bentang alam, serta *flora endemic* yang hanya dapat ditemukan di Pulau Flores, menjadi potensi tersendiri untuk di optimalkan.

B. Keberhasilan Pembantuan BOP Langkawi

Langkawi salah satu negara bagian di Malaysia yang memiliki Global Geopark dan diakui oleh UNESCO. Keberhasilan Geopark Langkawi hingga

di akui UNESCO pada dasarnya tidak terlepas dari peran BOP Langkawi. Terdapat beberapa pendekatan yang menjadi keberhasilan BOP Langkawi, diantaranya penetapan batas kewenangan, mengutamakan pelestarian *local wisdom*, konservasi sumber daya alam, dan melibatkan masyarakat lokal.

- Penetaan batas kewenangan
Penetapan batas merupakan bentuk pengoptimalan kawasan yang telah di beri berdasarkan peraturan yang berlaku. Penetapan batas ini, dapat diwujudkan dengan peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan mobilitas. Kemudahan mengakses destinasi satu dengan lainnya akan mendorong wisatawan untuk lebih memahami *local brand* kawasan itu sendiri.
- Pelestarian *local wisdom*
Sebagaimana yang terdapat di kawasan pengembangan, akan memberikan nilai serta pembentukan *local brand* yang lahir dari wisatawan.
- Konservasi sumber daya alam pariwisata
Konservasi sumber daya alam pariwisata dapat diwujudkan dengan konsep ekowisata. Konsep ekowisata sendiri sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keaslian dan keutuhan ekosistem di areal yang masih alami. Sehingga dengan mengedepankan konsep ekowisata akan, secara langsung meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan.
- Melibatkan masyarakat lokal
Kolaborasi masyarakat lokal dengan pelaku industri. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan pada masyarakat lokal serta memberikan peran untuk peningkatan pariwisata. Langkah ini juga akan meminimalisir konflik serta membangun persepsi positif dari masyarakat terhadap pengembangan pariwisata.

C. Organisasi BPO di Indonesia

Pembentukan Badan Otoritas Pariwisata pada Januari 2016. Sepuluh destinasi wisata yang biasa disebut dengan sepuluh “Bali” baru pada tahun 2016 sebagaimana yang dijelaskan di dalam Surat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Nomor S54/Menko/Maritim/VI/2016. Sebagai tahap awal, kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara menjadi proyek percontohan (pilot project), menyusul sembilan destinasi wisata lainnya, yakni Tanjung Kelayar (Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo (Jawa

Timur), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).

Badan Otoritas Pariwisata secara umum berwenang membangun infrastruktur dasar, seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, jaringan internet, dan fasilitas perhotelan. Pengelolaan destinasi wisata harus satu dan terintegrasi. Dengan adanya Badan Otoritas Pariwisata, pengelolaan destinasi wisata menjadi lebih simpel dan efisien.

Prinsip pelaksanaan dari pembentukan BOP salah satunya adalah penguatan *public private partnership* (PPP). Dalam pelaksanaan PPP perlu menekankan regulasi yang bersifat keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan oleh Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan di Our Common Future (1987) sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dasar dari penekanan tersebut dimana BOP itu sendiri memiliki kewenangan komprehensif yang dapat mengatur kawasan sebagaimana pembentukan BOP itu sendiri.



Sumber: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), 2016

Gambar 2.1 10 Kawasan Pariwisata Prioritas

2.1.2. Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Agenda pembangunan berkelanjutan dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Lingkungan, Sosial dan Ekonomi menjadi 3 (tiga) dimensi yang harus tetap diseimbangkan.



Lingkungan, Rencana Strategis yang disusun mampu upaya pelestarian lingkungan hidup yang (SDA berkelanjutan), aman dari bencana dan kerusakan keanekaragaman hayati serta adaptif terhadap perubahan iklim dan lingkungan.

Sosial, Rencana Strategis dapat menghindari segregasi ruang di tengah upaya mendorong Labuan bajo Flores menjadi pariwisata super premium (eksklusif), mengurangi angka pengangguran & tingkat kemiskinan, keberpihakan terhadap Adat dan kelompok rentan serta kelestarian budaya.

Ekonomi, peningkatan perekonomian pada skala lokal bahkan Nasional diharapkan mampu diwujudkan oleh penyusunan Rencana Strategis ini akan tetapi tidak meninggalkan daya saing masyarakat setempat, tingkat disparitas dan kesejahteraan penduduk.



Khusus di sektor pariwisata, United Nation-World Tourism Organisation (UNWTO) adalah badan yang dimiliki oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan dan dapat diakses secara universal. UNWTO mempromosikan pariwisata dunia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang inklusif serta kelestarian lingkungan. UNWTO sendiri bekerja berdasarkan 5 (lima) pilar, yaitu:

1. Membuat pariwisata *smarter* dengan merayakan inovasi dan memimpin transformasi digital;
2. Membuat pariwisata lebih kompetitif di setiap tingkat dengan mempromosikan investasi dan kewirausahaan;
3. Menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik dan memberikan pelatihan yang relevan;
4. Membangun ketahanan dan mempromosikan perjalanan yang aman dan mulus; dan
5. Memanfaatkan potensi unik pariwisata untuk melindungi warisan budaya dan alam dan untuk mendukung masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial.

2.1.3. Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata

Pariwisata Labuan Bajo mendapat perhatian khusus bagi pegiat-pegiat pariwisata setempat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kepariwisataan, tokoh agama, dan lembaga budaya. Perhatian tersebut terlihat dari partisipasi dalam merespon berbagai perubahan pariwisata Labuan Bajo. Pegiat pariwisata seringkali menjadi bagian dari upaya perubahan menuju pariwisata Labuan Bajo, baik inisiatif pegiat pariwisata sendiri maupun atas kebijakan pemerintah. Adapun dalam kondisi lain, pegiat pariwisata menjadi penyeimbang/pengkritik dari berbagai perubahan yang terjadi.

Perihal dinamika tersebut terafirmasi oleh beragam fakta yang terjadi beberapa tahun terakhir. Pegiat pariwisata turut serta menyempurnakan upaya promosi dan penyediaan atraksi wisata seperti galeri seni, pentas, membantu program pemerintah setempat. Pada sisi lain sebagai penyeimbang, pegiat pariwisata menjadi garda depan menentang upaya pembangunan yang dianggap merugikan ekologi Labuan Bajo dan sekitarnya. Sebagai misal pertentangan elemen masyarakat terhadap pembangunan hotel di Pantai Pede. Penolakan tersebut bergulir bertahun-tahun melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, seniman, tokoh Agama . Hingga yang teranyar adalah protes terhadap program pariwisata super premium yang turut menyeret Badan Otoritas Pariwisata.

Berdasarkan kondisi sosial kemasyarakatan di atas, maka perlu dilakukan pendalaman terhadap berbagai kemungkinan munculnya dinamika beragam dan bertahun-tahun tersebut. Pemetaan stakeholder kunci (sosial masyarakat) serta arah narasi pergerakannya dalam pembangunan pariwisata Labuan Bajo, serta pemilahan pendekatan perencanaan pembangunan pariwisata yang tepat untuk diterapkan dalam menanggapi kondisi sosial masyarakat.

Stakeholder kunci dalam lingkaran pariwisata Labuan Bajo teridentifikasi dalam dua kelompok yakni kelompok masyarakat dan pemerintah. Kelompok masyarakat berupa Lembaga Swadaya Masyarakat dan komunitas tertentu yang mempunyai perhatian terhadap pariwisata Labuan Bajo, organisasi pariwisata dan pekerja pariwisata, tokoh sosial masyarakat setempat dan tokoh agama, serta masyarakat yang berkarakter pasif dalam pembangunan pariwisata. Elemen kelompok masyarakat yang mempunyai pengaruh cukup besar adalah lembaga swadaya masyarakat dan komunitas pariwisata karena dukungan latar belakang sosial, pendidikan, serta porsi perhatian organisasi pada bidang

pariwisata Labuan Bajo. Lembaga Swadaya Masyarakat dapat dikatakan sebagai pusat pergerakan yang berdampak sosial karena mempengaruhi atau dipengaruhi kelompok lain dalam menanggapi berbagai isu pembangunan pariwisata Labuan Bajo dan Manggarai Barat pada umumnya. Pola-pola tersebut dapat dibuktikan dengan beragam dinamika sosial akibat pembangunan pariwisata selama beberapa tahun terakhir.



Gambar Stakeholder Pembangunan Pariwisata Labuan Bajo

2.1.4. Tourism Planning dan Strategic Plan Benchmarking

A. Tourism Planning

Perencanaan pariwisata mengaplikasikan konsep-konsep dasar perencanaan pada umumnya dengan penyesuaian terhadap karakteristik sistem pariwisata, untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata (Inskeep, 1991). Begitu kompleksnya dalam pengembangan pariwisata, sehingga dalam perencanaannya tidak hanya mementingkan wisatawan, tetapi harus melibatkan semua pihak yaitu para stakeholder, pemerintah, dan kalangan masyarakat lokal. Sehingga diperlukannya kesepahaman mengenai seluk beluk kepariwisataan, dampak positif dan negatifnya dan juga timbal balik antara sektor pariwisata dengan sektor lainnya.

Pariwisata dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Definisi lain dari pariwisata dikemukakan oleh Damanik dan Weber (2006) dalam Anonim (2017) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sementara Pariwisata menurut Marpaung (2003) dalam Anonim (2017) adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pengembangan sektor pariwisata ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta dapat memberikan manfaat terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan mengembangkan sektor pariwisata ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintah terutama dari segi pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah (Rahman, 2010).

Keberhasilan pengembangan pariwisata ditentukan oleh 3 faktor, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yoeti, 1996 dalam Rahman, 2010, sebagai berikut :

- Tersedianya objek dan daya tarik wisata;
- Adanya fasilitas *accessibility* yaitu sarana dan prasarana, sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata; dan
- Terjadinya fasilitas *amenities* yaitu sasaran kepariwisataan yang dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
- *Demand* pariwisata sangat berkaitan dengan pengguna atau konsumen (wisatawan) Wisatawan diistilahkan sebagai pasar, karena wisatawan merupakan target atau sasaran yang hendak dituju dalam suatu penawaran pariwisata. Sehingga faktor permintaan yang datang dari para wisatawan tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan pariwisata (Rahman, 2010).

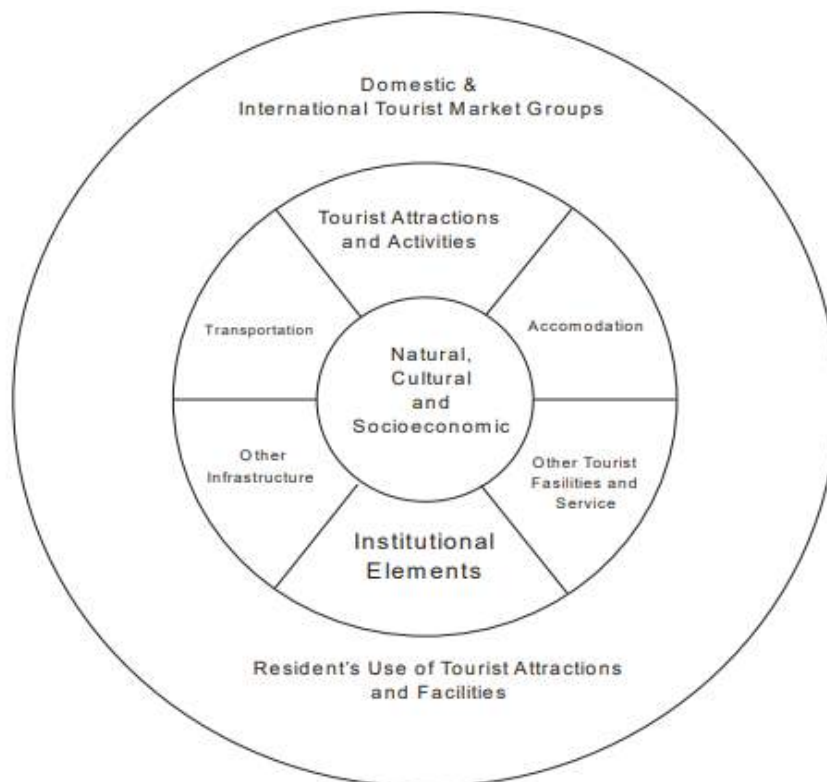
Kebijakan pariwisata memberikan filsafat dasar untuk pembangunan dan menentukan arah pengembangan pariwisata di destinasi tersebut untuk masa depan. Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Dalam pelaksanaan

pengembangan, perencanaan merupakan faktor yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan. Menurut Inskeep (1991:29), terdapat beberapa pendekatan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan pariwisata, di antaranya:

- Continuous Incremental, and Flexible Approach, dimana perencanaan dilihat sebagai proses yang akan terus berlangsung didasarkan pada kebutuhan dengan memonitor feed back yang ada;
- System Approach, dimana pariwisata dipandang sebagai hubungan sistem dan perlu direncanakan seperti dengan teknik analisa sistem;
- Comprehensive Approach, berhubungan dengan pendekatan sistem diatas, dimana semua aspek dari pengembangan pariwisata termasuk didalamnya institusi elemen dan lingkungan serta implikasi sosial ekonomi, sebagai pendekatan holistic;
- Integrated Approach, berhubungan dengan pendekatan sistem dan keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem dan keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem yang terintegrasi dalam seluruh rencana dan total bentuk pengembangan pada area;
- Environmental and sustainable development approach, pariwisata direncanakan, dikembangkan, dan dimanajementi dalam cara dimana sumber daya alam dan budaya tidak mengalami penurunan kualitas dan diharapkan tetap dapat lestari sehingga analisa daya dukung lingkungan perlu diterapkan pada pendekatan ini;
- Community Approach, pendekatan yang didukung dan dikemukakan juga oleh Peter Murphy (1991) menekankan pada pentingnya memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan pariwisata, untuk dapat meningkatkan yang diinginkan dan kemungkinan, perlu memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan manajemen yang dilaksanakan dalam pariwisata dan manfaatnya terhadap sosial ekonomi;
- *Implementable Approach*, kebijakan pengembangan pariwisata, rencana, dan rekomendasi diformulasikan menjadi realistis dan dapat diterapkan, dengan teknik yang digunakan adalah teknik implementasi termasuk pengembangan, program aksi atau strategi, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengadopsi; dan
- *Application of systematic planning approach*, pendekatan ini diaplikasikan dalam perencanaan pariwisata berdasarkan logika dari aktivitas

Isu-isu strategis dalam *Sustainable Tourism* adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan tanggung jawab Stakeholder Corporate;
- Menghasilkan Bentuk pariwisata yang cocok;
- “Sustaining” Sumber Daya Sosial dan Budaya;
- “Sustaining” Lingkungan Alam;
- Kebutuhan atas rencana yang efektif untuk Perencanaan Daerah Tujuan Wisata;
- Peranan “Carrying Capacities” dan indikator-indikator dalam Sustainable Tourism;
- Menghindari konflik;
- Peningkatan Keterlibatan Masyarakat; dan
- Pengarahan untuk masa depan.



Sumber: Inskeep (1991:38)

Gambar 2.2 Komponen Perencanaan/ Pengembangan Pariwisata

B. Strategic Plan Benchmarking

Badan Otorita Borobudur (BOB)

Dari situs bob.kemenpar.go.id, Badan Otorita Borobudur (BOB) mengembangkan kawasan pariwisata eksklusif bernuansa alam yang berada di

Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kawasan ini akan dikembangkan dengan konsep *Culture and Adventure Eco-Tourism*, tentunya dengan mengembangkan aspek kelestarian dan keramahan pada alam. BOB memiliki tiga program utama, yaitu penetapan visioning kawasan, penyelesaian akses, dan penetapan status lahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, BOB berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam kegiatan penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, yang menghasilkan Rencana Pengembangan Konektivitas dan Destinasi Wisata Tahap 2 (2025-2030) pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Rencana Pengembangan Konektivitas dan Destinasi Wisata Tahap 2 (2025-2030)

Pengembangan Konektivitas	Pengembangan Destinasi Borobudur
- Jalan Tol Bawen - Yogyakarta - Jalan Tol Solo - Yogyakarta - YIA - Kereta Api Kota Yogyakarta - Pengaktifan kembali Kereta Api Yogya - Borobudur - Perbaikan jalan YIA - Nanggulan - Borobudur - Jalan Prambanan - Lemah Abang	- Pembatasan pengunjung - Pembangunan museum - Gerbang masuk - Merelokasi tempat parkir dan pedagang - Pilgrim Borobudur - Pawon - Mendut - Pemberdayaan BUMDes dan Balkondes - Pengembangan desa wisata di sekitar Borobudur
Pengembangan Destinasi Prambanan	Pengembangan Destinasi Yogyakarta
- Revitalisasi candi Perwara - Pengaturan candi di sekitar Prambanan (Candi Plaosan, Sojiwan, Banyunibo, Ijo) - Transfer parkir yang ada ke Bugisan - Tempat parkir dan tempat istirahat Bokoharjo - Kebun Raya Prambanan - Pengembangan desa wisata	- Revitalisasi OUV dari poros filsafat - Mempelajari potensi area parkir - Pengembangan desa wisata di perbatasan Sungai Code dan Sungai Winongo - Revitalisasi Jagang, Cepuri, Rumah Kalang, Pasar Kotagede - Parkir Singosaren

Sumber: ITMP BYP Rencana Pengembangan Keseluruhan, 2020

Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT)

Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) pada Tahun 2017 lalu melakukan hal yang kurang lebih sama, yaitu melakukan kerjasama pelaksanaan *Collaborative Planning Workshop* bersama dengan IAP yang menghadirkan semua elemen *stakeholders* yang membahas bagaimana pengembangan pariwisata Danau Toba untuk mencapai target yang diinginkan pada tahun-tahun ke depan.

Pelaksanaan kerjasama tersebut dilaksanakan dengan menguraikan metode pengembangan destinasi di antaranya Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas (3A). Mengedepankan prinsip *Planning is a continous Process* yang dilaksanakan secara komunikatif, setara dan komprehensif menjadikan proses penyusunan rencana pengembangan tersebut menjadi terpadu. Mengedepankan visi bersama untuk menjadikan pariwisata Danau Toba menjadi lebih maju.

Dari proses yang menyeluruh seperti ini melahirkan *strategic plan* yang kuat, terukur dan aplikatif. Adapun *Highlight* utama dari model strategic plan BOP Danau Toba adalah sebagai berikut:

	Aksesibilitas	Amenitas	Atraksi
Impresi (pertanyaan) stakeholder terhadap kondisi saat ini	Mengapa Bandara Sibisa tidak dikembangkan? Dan mengapa bis damri tidak tersedia (beroperasi) dari Silangit ke destinasi toba Kapal Cruise dan feri membutuhkan kesiapan dermaga, tidak hanya teknis kepelabuhanan, tetapi juga jaringan jalan+ moda transportasi ke obyek wisata Akses masyarakat dan tempat usaha kepada air bersih dan energi juga menjadi penting	Ketidaknyamanan berwisata disebabkan karena karakter pelaku wisata maupun masyarakat lokal yang belum berorientasi pada pelayanan wisata Contoh: Aggressive Selling, uncertain service prices, bicara yang terlalu keras, kurang intensif dalam menarasikan atas budaya yang ada Kualitas sumber daya manusia yang berkecimpung dalam pengelolaan dan bisnis pariwisata masih perlu ditingkatkan agar dapat menciptakan produk wisata yang memiliki nilai jual internasional Pariwisata belum menjadi pilihan, sehingga masyarakat belum menyelami pekerjaan di bidang pariwisata	Tidak terawatnya obyek wisata yang sudah ada dan belum dikembangkannya potensi saat ini (<i>place making</i>) menyebabkan lemahnya nilai wisata Contoh: sampah maupun tanaman air di pinggiran danau yang mulai bermunculan, kerajinan enceng gondok, safety kapal ferry, tidak adanya kapal cruise, dll Belum dikembangkannya produk-produk khas daerah yang memiliki standar internasional, seperti lapo tuak yang masih memiliki stigma negatif. Standar lingkungan yang perlu ditingkatkan dan dijaga, khususnya untuk menambah jalur pepohonan, penataan tepian danau, dan penambahan atraksi buatan yang bersinergi dengan alam setempat
Solusi yang diusulkan	Sistem multi-moda transportasi dari airport-transportasi darat-feri penyebrangan-jalur sepeda-pejalan kaki yang terpadu, termasuk penyediaan single ticket for 1-day or 3-days Pembangunan jalan lingkar dalam Pulau Samosir, dan Jalan lingkar luar Danau Toba untuk mengarahkan pola mobilitas wisatawan Perbaikan penyediaan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, air limbah, dan persampahan)	Human Capital development, tidak hanya masalah penguatan budaya dan perbaikan sikap, tetapi juga entrepreneurship dalam pariwisata Pembangunan sosial (<i>social engineering</i>) yang menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk didalamnya sertifikasi profesi pelaku usaha wisata,	Creative economy dan desain ruang yang berkarakter budaya perlu diterapkan dengan penetapan prinsip, kaidah, dan perancangan kawasan di 8 kabupaten Pengembangan ruang (<i>place-making</i>) yang atraktif dan berkarakter sesuai kebudayaan dan lansekap alam Danau Toba

Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs itdc.co.id, PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau biasa disebut Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) merupakan perusahaan milik negara yang berspesialisasi dalam pengembangan dan pengelolaan kompleks pariwisata terintegrasi. Upaya yang dilakukan ITDC untuk mencapai misinya membentuk

sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pengelolaan destinasi adalah dengan membentuk program bina lingkungan, program tersebut melibatkan masyarakat setempat dalam melakukan pelatihan yang dapat meningkatkan kreatifitas dan kemampuan masyarakat mendukung bidang kepariwisataan. ITDC juga membentuk program kemitraan untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan produk yang dihasilkan oleh usaha masyarakat.

Langkawi Geopark (Malaysia)

Dilansir dari situs unesco.org, Langkawi Geopark (Malaysia) terletak di sepanjang Selat Malaka, dan terkenal sebagai rute perdagangan bersejarah di Asia Tenggara. Warisan budaya yang berpadu dengan kekayaan alam, menambah pesona budaya lokal. Langkawi Geopark dilengkapi dengan akomodasi dan fasilitas yang menunjang pengunjung untuk memaksimalkan pengalaman dengan warisan alam dan budaya yang ada. Program pendidikan yang dilakukan Langkawi Geopark didukung oleh Sekolah Geopark dan Program Komunitas Geopark.

Program yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pariwisata Langkawi Geopark didukung oleh jaringan anggota (orang dan organisasi) yang memiliki visi yang sama dalam meningkatkan citra Geopark. Mulai dari membantu melestarikan keindahan alam dan sumber daya Langkawi, hingga mempromosikan acara dan program yang diadakan untuk Geopark. Rencana Pengelolaan Geopark Langkawi menetapkan pedoman untuk pengelolaan warisan alam dan budaya Langkawi menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan ekologi.

2.2. ORGANISASI BPOLBF

Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk mendorong percepatan pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata pada sepuluh destinasi prioritas, di mana lima di antaranya ditetapkan sebagai Destinasi Super Prioritas, yaitu destinasi wisata Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Borobudur di Provinsi Jawa Tengah, Labuan Bajo Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Likupang di Provinsi Sulawesi Utara.

Selain ditetapkan sebagai salah satu Destinasi Super Prioritas, Labuan Bajo Flores (LBF) juga digadang-gadang akan menjadi wisata premium berkelanjutan kelas dunia.

Oleh karena itu, dalam rangka mendorong optimalisasi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan, maka dibentuklah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sesuai dengan Peraturan Presiden No 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo – Flores (Perpres 32/2018).

2.2.1. Tugas dan Fungsi BPOLBF

Dalam menjalankan fungsinya BPOLBF diberikan tugas untuk mengembangkan suatu kawasan inti sebagai penggerak wilayah sekaligus menjadi kegiatan baru sebagai alternatif bagi wisata bahari dan budaya LBF yang telah ada.

Tugas yang diemban BPOLBF tersebut untuk mendorong pertumbuhan wisata *off-grid* yang bersifat '*nomadic tourism*', eko wisata yang dikombinasikan dengan *retreat* ke alam serta beraktifitas yang interaktif dengan alam, budaya lokal dan kegiatan masyarakat setempat. Saat ini berkembang wisata '*glamour camping*' (glamping) serta aktivitas berinteraksi dalam alam baik dalam bentuk olah raga, edukasi, pengalaman (*experiencing*) dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Wisata demikian merupakan wisata yang *sustainable* dan bersahabat dengan alam, dalam hal ini menjadi trend *lifestyle* bagi *high-end tourism*. Adapun tugas dan fungsi BPOLBF sebagaimana disebutkan dalam Perpres 32/2018 dijelaskan pada bagan berikut:



Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018

Gambar 2.4 Tugas dan Fungsi BPOLBF

2.2.2. Mandat Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo – Flores

Berdasarkan Perpres 32/2018, cakupan Kawasan Pariwisata LBF ini meliputi 7 (tujuh) kawasan pengembangan pariwisata, yaitu:

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Komodo dan sekitarnya;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Labuan Bajo dan sekitarnya;
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Ruteng dan sekitarnya;
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Bajawa dan sekitarnya;
- e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Ende-Kelimutu dan sekitarnya;
- f. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Maumere-Sikka dan sekitarnya; dan
- g. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Larantuka dan sekitarnya.

Kawasan otoritatif BPOLBF mencakup kawasan seluas 400 (empat ratus) hektar, yang merupakan kawasan hutan yang terletak di Hutan Bowosie, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahap awal, cakupan kawasan yang diberikan hak pengelolaan kepada BPOLBF paling sedikit seluas 136 (seratus tiga puluh enam) hektar yang terletak di Desa Gorontalo (83 hektar) dan Desa Nggorang (53 hektar), Kecamatan Komodo. Cakupan kawasan yang belum diberikan hak pengelolaan kepada BPOLBF dapat diusulkan oleh Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.



Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018

Gambar 2.5 Kawasan Koordinatif 11 Kabupaten BPOLBF

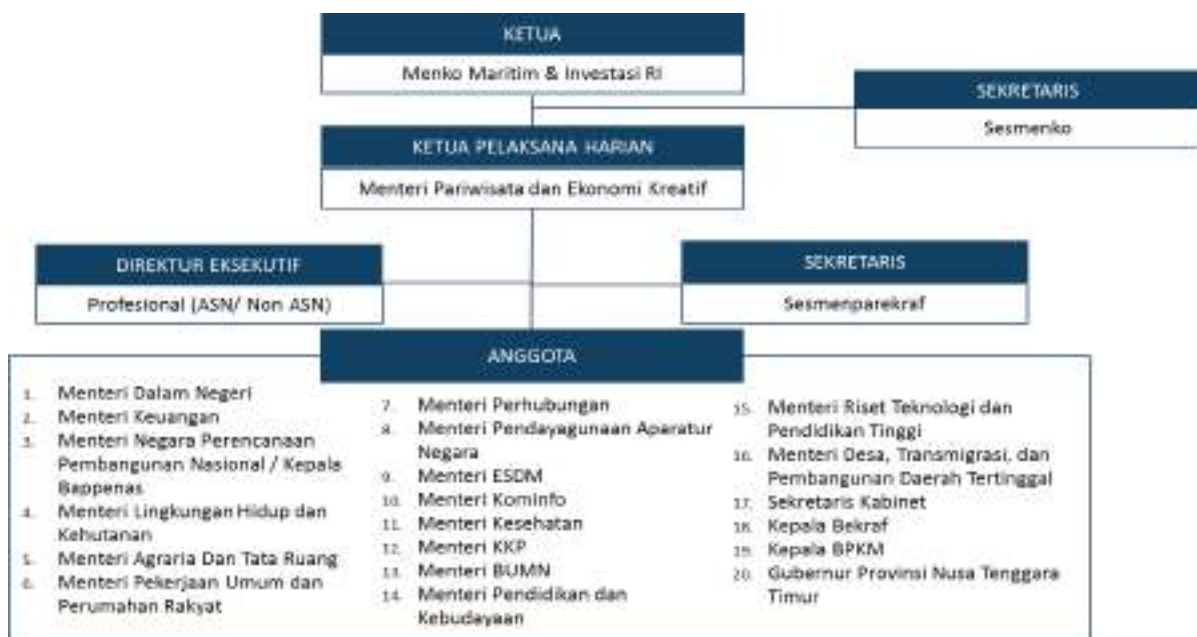
2.2.3. Susunan Organisasi BPOLBF

Susunan organisasi BPOLBF terdiri atas: 1) Dewan Pengarah; dan 2) Badan Pelaksana. Dewan Pengarah terdiri atas:

1. Ketua merangkap anggota
2. Ketua Pelaksana Harian merangkap anggota
3. Anggota

Dewan Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata LBF;
- b. Menyinkronkan kebijakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata LBF;
- c. Memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan Pelaksana mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata LBF sesuai dengan kebijakan umum pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata LBF yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.

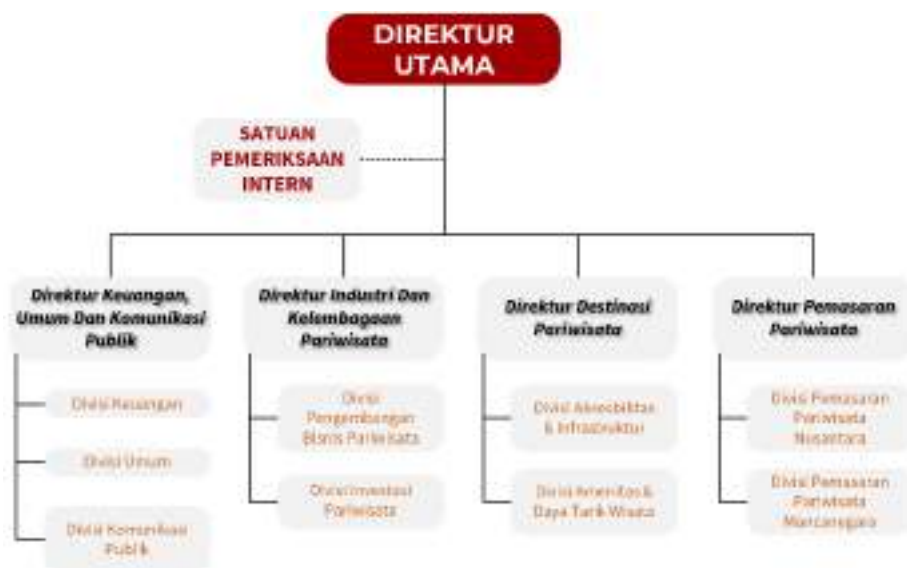


Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018

Gambar 2.6 Susunan Dewan Pengarah BPOLBF

Badan Pelaksana harus memperhatikan aspirasi, budaya, karakteristik dan masukan dari masyarakat yang ada di Kawasan Pariwisata LBF dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, Badan Pelaksana juga dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha dan lembaga/pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerja sama yang dilakukan harus memiliki nilai strategis tertentu dan wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, susunan Badan Pelaksana BPOLBF dijelaskan pada bagan berikut:



Sumber: Pelantikan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2018

Gambar 2.7 Susunan Badan Pelaksana BPOLBF

1. Direktur Utama;
2. Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik;
Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, advokasi hukum, serta komunikasi publik.
3. Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata;
Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores dan perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores di bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata.

4. Direktur Destinasi Pariwisata;

Direktur Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores dan perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores di bidang Destinasi Pariwisata.

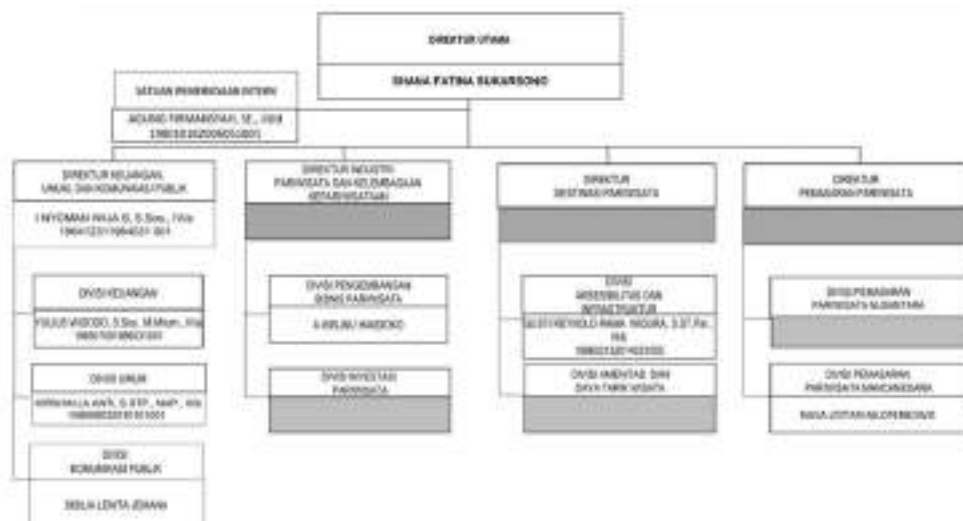
5. Direktur Pemasaran Pariwisata; dan

Direktur Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan perumusan strategi, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores di bidang Pemasaran Pariwisata.

6. Satuan Pemeriksaan Intern.

Satuan Pemeriksaan *In tern* adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Kepala Badan Pelaksana, pejabat, dan pegawai di BPOLBF dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan Badan Pelaksana. Pelantikan Direksi Badan Pelaksana yang menjabat pada periode ini telah dituangkan pada Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.14/KP.04/MENPAR/2019 tanggal 14 Januari 2019. Namun, saat ini terdapat kekosongan pada 3 (tiga) posisi direksi dan 3 (tiga) posisi kepala divisi. Berikut adalah struktur organisasi Badan Pelaksana BPOLBF saat ini:



Sumber: BPOLBF, 2020

Gambar 2.8 Susunan Badan Pelaksana BPOLBF

Direktur Utama BPOLBF 2019-Sampai saat ini dipimpin oleh Shana Fatina, dengan latar belakang pendidikan di program studi Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung, beliau aktif di dunia organisasi sehingga pernah menjabat sebagai Presiden Keluarga Mahasiswa ITB tahun 2008-2009, pertama kalinya organisasi ini dipimpin oleh seorang perempuan. Selain keorganisasian, beliau aktif di dunia musik serta merupakan aktivis yang bergerak di bidang lingkungan. Kewirausahaan juga menjadi minatnya sehingga menjadikannya sebagai seorang pengusaha muda.

2.2.4. BPOLBF Hingga Saat Ini

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp4 miliar untuk penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terhadap sektor kepariwisataan di 11 (Sebelas) Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), diantaranya, Flores, Lembata, Alor dan Bima yang merupakan zona koordinatif BPOLBF.

Untuk meningkatkan coverage kawasan pariwisata, BPOLBF telah menggelar Familiarization Trip (Famtrip) Media Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), 11-13 September 2020. Sebanyak 17 media disertakan, lalu 53% persen slot diisi media nasional dengan basis cetak, online, dan televisi.

Sementara itu, Catatan VoxNtt.com dalam waktu empat bulan, BPOLBF harus kehilangan tiga direksi sekaligus. Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata Jarot Trisunu mengundurkan diri sejak November 2019 lalu. Kemudian Direktur Pemasaran Pariwisata Sutanto Werry mengundurkan diri pada bulan Desember 2019. Lalu, Direktur Destinasi Pariwisata Herybertus Geradus Laju Nabit mengundurkan diri pada akhir Februari 2020. Sejauh ini aktivitas BPOLBF berjalan seperti biasa yang disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini.

2.3. KAJIAN PERATURAN

2.3.1. Dasar Hukum Pembentukan BPOLBF

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) di tetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Sebelumnya telah

di tetapkan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2018 tentang Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuhan Bajo Flores.

Sebagaimana Perpres No. 32 Tahun 2018 tentang Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuhan Bajo Flores huruf b “bahwa untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan pariwisata Labuan Bajo Flores, diperlukan pengaruran secara khusus, guna menyatukan pelaksanaan kewenangan pengelolaan kawasan terseut melalui pembentukan Badan Otoritas Pengelolan Kawasan Pariwisata Labuhan Bajo Flores” kemudian huruf c, “bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores”.

2.3.2. Dasar Hukum Penyusunan Renstra BPOLBF

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPOLBF pada dasarnya untuk mengakomodasi upaya-upaya penguatan komitmen dan jejaring serta perumusan visi, misi, strategi, dan program bersama lembaga tata kelola kolaboratif. Penyusunan Rencana strategis (Renstra) merujuk pada Pepres No. 32 Tahun 2018 pasal 15 huruf d yang berbunyi penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuhan Bajo Flores sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (3).

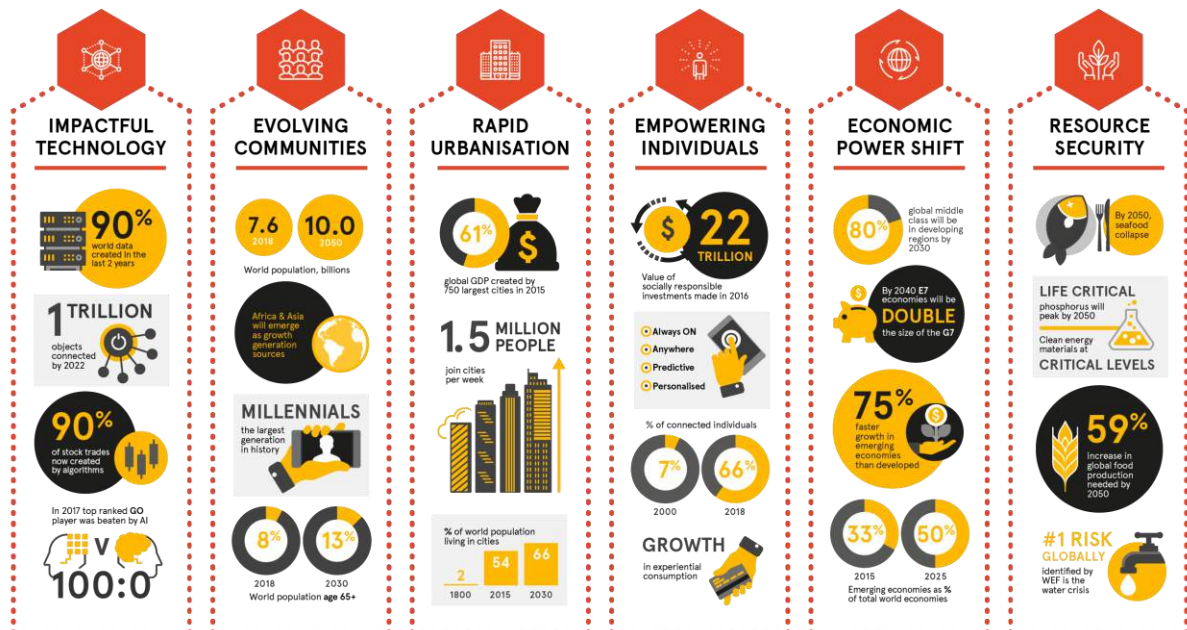


#3

ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN LABUAN BAJO, FLORES



3.1. Dinamika Global



(Sydney Business Insight, 2020)



Impactful technology

Kita telah memasuki revolusi industri keempat. Sembilan puluh persen dari data dunia telah dibuat dalam 2 tahun terakhir. Dalam 5 tahun terakhir jumlah orang yang menggunakan internet tumbuh sebesar 83%. Hampir 60% populasi dunia sekarang terhubung dan hampir setengah dari kita menggunakan media sosial.

Dari sektor pariwisata, Labuan Bajo menjadi arahan utama dalam pembangunan wisata super-premium di Indonesia. Hal tersebut semaksimal-mungkin harus didukung oleh kemajuan dari perkembangan teknologi informasi (sosial media, website) yang memudahkan penyebaran informasi wisata super-premium Labuan Bajo Flores. Tantangannya ke depan adalah bagaimana pengembangan teknologi informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan seiring dengan kebutuhannya yang mendesak.

Laju perubahan adalah ajakan untuk memahami perubahan besar yang sedang terjadi, dan untuk memastikan bahwa teknologi ini memberdayakan individu, bisnis, dan komunitas. Respons yang diperlukan untuk teknologi yang berdampak pada segala lini ini, adalah untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang apa artinya menjadi manusia. (Sydney Business Insight, 2020)



Demographic change

Komunitas di seluruh dunia sedang mengalami perubahan demografis yang cepat dan mendalam, menciptakan tantangan baru bagi bisnis dan individu. Perubahan demografis dan sosial

akan membuat pemerintah dan Stakeholders menemukan peluang besar sekaligus menghadapi tantangan besar, karena generasi terbesar dalam sejarah, pergerakan perekonomian diperankan oleh kelompok millennial. Generasi millennial dan mereka yang datang setelahnya, akan lebih terdidik dan memiliki ekspektasi yang berbeda terkait dengan peluang, mobilitas, hubungan, dan kepemilikan.

Dengan demikian, pelibatan kelompok millennial ini menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan. Selain jumlah, kecepatan serta adaptasi terhadap teknologi pada kelompok yang sangat besar ini akan memberikan daya dukung sosial yang tinggi dalam menggerakkan perekonomian pada sektor pariwisata di Labuan Bajo-Flores. Sehingga, diharapkan produk dari rencana ini mampu mengakomodir kebutuhan kelompok sosial terutama millennial untuk menjadi produsen tidak hanya sebagai *konsumer*.



Rapid urbanisation

Urbanisasi menciptakan peluang besar untuk kota-kota yang cerdas dan ramah lingkungan, ada juga tantangan signifikan yang datang dengan berbagai jenis urbanisasi termasuk tuntutan yang luar biasa pada infrastruktur dan lingkungan, penyediaan layanan dan penciptaan lapangan kerja. Kota mengkonsumsi tiga perempat sumber daya alam dunia.

Labuan Bajo-Flores dengan arahan direktif sebagai kawasan wisata Super-Premium tentu saja akan mendorong peningkatan yang sangat signifikan pada sektor jasa. Kondisi ini dapat proyeksikan Labuan Bajo-Flores akan tumbuh sebagai Kota besar baru yang mengedepankan sektor jasa kepariwisataan yang eksklusif dan terencana dengan baik. Untuk itu, bagaimana kesiapan perencanaan pembangunan wilayah baik daerah maupun pemerintah pusat serta lembaga yang menaunginya untuk merespon *Megatrend* tersebut.



Economic power shift

Pergeseran kekuatan ekonomi besar ini secara fundamental akan mengubah kemakmuran individu dan masyarakat. Peluang ini, bersama dengan risiko yang signifikan, harus bisa terakomodir secara sekaligus pada setiap konsepsi perencanaan pada pembangunan pariwisata Labuan Bajo-Flores secara berkelanjutan. Kemajuan ekonomi sektor pariwisata dapat maju dengan cepat bersama dengan kesejahteraan masyarakatnya.



Megatren keamanan iklim dan sumber daya menangkap meningkatnya tekanan pada sumber daya penting dalam narasi mega-ekologis perubahan iklim.

Produksi gas rumah kaca berjalan tidak beriringan dengan kesejahteraan ekonomi dan lingkungan. Peningkatan pembangunan salah satunya di bidang kepariwisataan harus memperhatikan lingkungan alam untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keindahan dan keanekaragaman lingkungan di Labuan Bajo-Flores dapat dimanfaatkan dengan terencana untuk sekaligus memeliharanya.

3.1.2. Inovasi Pariwisata

Destinasi pariwisata yang ada di Labuan Bajo-Flores memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai pariwisata Super-premium bertaraf Internasional. Hal ini, tentu saja harus didukung dengan tingkat inovasi berstandar Internasional baik dari sisi fisik, fasilitas, infrastruktur serta sumber daya masyarakat yang sadar wisata (Pokdarwis) yang juga berstandar International. Inovasi tersebut dapat melihat serta menawarkan hal baru berasaskan kearifan lokal masyarakat Labuan Bajo-Flores yang membentuk model arsitektural destinasinya.

3.1.3. Stabilitas Politik

Secara legal, Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores ini lahir dari sebuah kebijakan Presiden melalui Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2018 dengan harapan dapat mengelola pengembangan dan mempercepat pembangunan kawasan Pariwisata Labuan Bajo-Flores. maka pembentukan BPOLB-F ini dapat dilaukan dengan langkah terkoordinasi, sistematis, terarah dan terpadu serta menyatukan pelaksanaan kewenangan pengelolaan kawasan tersebut.

Di sisi lain, pembentukan BPOLB-F oleh Peraturan Presiden secara politik memiliki kerentanan tertentu. Terutama pada saat visi pembangunan setor kepariwisataan dapat berubah-ubah seiring dengan adanya pergantian kepemimpinan di level nasional maupun daerah saat pemilihan umum dijalankan. Hal tersebut menjadi tantangan khusus dalam menjalankan setiap program dan perencanaannya untuk dapat melihat lebih jauh tingkat kepentingan dari pelaksanaan program tersebut yang mampu melampaui dinamika politik yang ada.

3.1.4. Trend Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19

Labuan Bajo merupakan destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Adapun jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo selama empat tahun terakhir, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Jumlah Wisatawan Labuan Bajo

No	Tahun	Jumlah Wisatawan (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
1	2015	27.325	-
2	2016	26.663	-0.02
3	2017	18.632	-0.30
4	2018	67.592	2.63
Total		112.887	2.30
Rata - rata		35.053	0.77

Sumber: Databoks, 2020

Berdasarkan data pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,28 persen, lalu pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 2.03 persen. Rata-rata pertumbuhan wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo dari tahun 2015 sampai tahun 2018 sebesar 0,77 persen.

Data di atas akan dielaborasi pada pelaksanaan kunjungan maupun rapat teknis dengan instansi terkait untuk mendapatkan data yang lebih detail termasuk asal wisatawan, lama tinggal dan kontribusi perekonomiannya terhadap pendapatan daerah.

Labuan Bajo Flores sebagai salah satu yang menjadi fokus pengembangan destinasi pariwisata super-premium turut merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Praktis selama masa pandemi ini, terhitung sejak Bulan Maret lalu semua destinasi wisata ditutup. Tidak ada lagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang datang berkunjung.

Situasi ini tentunya membuat berbagai sektor, pelaku-pelaku usaha jasa wisata atau juga industri kreatif dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari masyarakat lokal ikut terdampak dan menyebabkan penurunan perekonomian yang cukup besar bagi masyarakat dan daerahnya. Pandemi Covid-19 mengakibatkan pemerintah daerah Manggarai Barat kehilangan pendapatan sebesar 5 miliar rupiah dari sektor pariwisata. Ini tentunya tidak sejalan dengan yang diinginkan pemerintah daerah yang semula menargetkan pendapatan sebesar 30 miliar rupiah, dan evaluasi kembali menjadi Rp 9 miliar saja.

Pandemi Covid-19 telah memberi pelajaran penting terutama pada pengembangan sektor pariwisata di Indonesia khususnya Labuan Bajo-Flores. Pembangunan kepariwisataan menjadi semakin maju dan modern dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan lingkungan. Apalagi dengan Labuan Bajo-Flores menjadi destinasi super-premium tentu saja keamanan dan kesehatan masyarakat setempat, para wisatawan dan pelaku usaha harus terjamin dengan baik.

3.2. KELEMBAGAAN

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 mengamanatkan pembentukan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) yang mempunyai tugas dan fungsi otoritatif dan koordinatif. Pada lingkup otoritatif, BPOLBF melakukan pengelolaan kawasan seluas 400 hektar yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat. Sementara pada tataran koordinatif, BPOLBF melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pengendalian di kawasan Labuan Bajo Flores, selain bertugas melakukan perencanaan, pengembangan, pengendalian di kawasan Labuan Bajo Flores.

Tugas dan fungsi BPOLBF menyiratkan bahwa kawasan pariwisata Labuan Bajo membutuhkan lembaga di bawah Presiden untuk pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Pemerintah mengharapkan BPOLBF dapat mengakselerasikan pembangunan pariwisata Labuan Bajo Flores sekaligus merespon perubahan fenomena pariwisata yang sangat cepat baik secara lokal, nasional maupun global.

Secara kelembagaan, kehadiran BPOLBF memperkuat lembaga pemerintah daerah seperti Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai dalam implementasi program pembangunan kepariwisataan; merampingkan upaya pengelolaan perihal koordinasi dan sinkronisasi berbagai kepentingan pembangunan pariwisata Labuan Bajo.

Namun, pada sisi lain kehadiran BPOLBF menambah kompleksitas upaya koordinasi pembangunan kepariwisataan karena berhadapan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta yang kurang koordinatif dan ego sektoral (Widaningrum dan Damanik, 2018)¹. BPOLBF memperpanjang jejak administrative serta mengancam eksistensi lembaga lain yang telah, sedang dan akan berkontribusi dalam pembangunan pariwisata Labuan Bajo.

Penelitian Kodir, dkk. (2020)² yang mengungkap *“akses pariwisata didominasi oleh aktor-aktor yang memiliki kekuatan permodalan dan mereka menguasai akses ke lingkaran ekonomi pengelola pariwisata. Di sisi lain, masyarakat tidak dapat dilibatkan sebagai pelaku ekonomi utama dalam tata kelola pariwisata”* menunjukkan resistensi lembaga swasta terhadap pemerintah seperti BPOLBF. Upaya mempercepat pembangunan melalui

¹ Widaningruma, A., and Damanik, J. 2018. Stakeholder Governance Network in Tourist Destination: Case of the Komodo National Park and Labuan Bajo City, Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 191.

² Kodir, A., Tanjung, A., Astina, I.K., Nurwan, M.A., Nusantara, A.G & Ahmad, R.(2020). THE DINAMICS OF ACCESS ON TOURISM DEVELOPMENT IN LABUAN BAJO,INDONESIA.*GeoJournal of Tourism and Geosites*, 29(2), 662–671.

koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi serta berwenang menginisiasi rencana pembangunan dapat dinarasikan sebagai penyempurnaan akses pemodal di Labuan Bajo.

Temuan tersebut dapat dihubungkan dengan fokus pembangunan lembaga swasta dan pemerintah (BPOLBF) dalam sumbangsih pembangunan Labuan Bajo. Pada kondisi eksisting, lembaga swasta (LSM) berada berfokus pemberdayaan masyarakat, seperti desa wisata, seperti Desa Liang Ndara dan Desa Tado di sebelah timur Kota Labuan Bajo. Dua desa tersebut digarap atas inisiasi lembaga swasta/NGO, bukan pemerintah. Sebaliknya pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur yang disebut lembaga swasta setempat sebagai pembangunan massif. Dua kondisi tersebut bermuara pada narasi keberadaan lembaga yang mengkapitalisasi atau eksklusivitas ruang kota versus lembaga yang memberdayakan masyarakat setempat.

3.3. Lingkungan Hidup

Penetapan Labuhan Bajo sebagai salah satu 10 Destinasi Wisata Prioritas secara perlahan akan membawa implikasi pada kebijakan pembangunan wilayahnya. Dengan berasumsi sama di semua wilayah dan dengan cara apapun membangun wilayah, akan memiliki banyak kesamaan terhadap masalah lingkungan. Meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas pembangunan kedepan di wilayah ini selain mengakibatkan tingginya pemanfaatan lahan, air dan sumberdaya alam lainnya, juga menimbulkan kerusakan sumberdaya alam dan menghasilkan sampah, limbah serta polusi yang semakin meningkat. Hal ini yang dapat mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pembangunan di Labuhan Bajo yang diformulasikan dalam kebijakan dan rencana serta program-programnya mutlak harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Dan sebagai konsekuensinya formula pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.c

Pembangunan pemanfaatan ruang yang ada di ruang daratan, perairan dan udara Labuhan Bajo dan Flores secara umum berpotensi menimbulkan dampak Lingkungan Hidup antara lain:

1. Perubahan iklim;
2. Kerusakan, kemerosotan, dan kepunahan keanekaragaman hayati (*biodiversity*);
3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan lahan;

4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
5. Peningkatan alih fungsi lahan dan kawasan hutan;
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat;
7. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Sebagai destinasi wisata yang ditarget *premium*, tergambarkan gula yang didatangi oleh semut dan penikmat gula lainnya akan membawa jumlah populasi kawasan ini. Penduduk dan wisatawan berkorelasi dengan naiknya kebutuhan akan air, makanan, energi dan lainnya. Demikian juga naiknya volume sampah dan limbah. Sampah dan limbah jika tidak diberlakukan secara *premium* akan terjadi polusi yang menurunkan kualitas lingkungan dikawasan wisata *premium*. Dan akan terjadi rentetan masalah-masalah akibat pembangunan lainnya yang langsung melibatkan lingkungan hidup di Kawasan Labuhan Bajo. Tidak hanya lingkungan hidup namun juga berdampak kepada manusia (penduduk). Polusi sampah, polusi air, meningkatnya limbah dan kotorannya udara merupakan ancaman terhadap kesehatan penduduk Labuhan Bajo Flores dan secara luas kepada pelaku ekonomi wilayah dan wisatawan yang tidak luput didalamnya.

Perubahan fungsi lahan sebagai dampak pemenuhan kebutuhan ruang dan kegiatan kawasan membawa konsekuensi lain yakni bertambahnya luasan lahan terbangun, pemenuhan ruang infrastruktur yang akan berimplikasi terhadap menurunnya kelimpahan sumberdaya alam, berkurangnya keanekaragaman hayati, okupasi wilayah hutan dan kawasan lindung lainnya. Sedang di wilayah perairan keanekaragaman hayati dan biota laut diwilayah pantai juga tak luput aman dari dampaknya. Terlebih aktifitas manusia dan pembangunan dikaitkan dengan ancaman perubahan iklim, niscaya akan semakin kuat bahaya *latent* polusi sampah, polusi air dan udara membawa bencana lingkungan hidup yang dahsyat dan pasti memukul pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Selayaknya percepatan ekonomi kawasan wisata premium Labuhan Bajo dengan potensi geoekonomi dan geostrategic mempertimbangkan pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Sebagai bagian dari provinsi kepulauan yang masuk dalam kategori pulau-pulau kecil perhatian terhadap ketersediaan, keseimbangan dan kelestraian sumberdaya alam mutlak dilakukan.

3.4 Sosial Budaya

Sosial masyarakat dan pariwisata berada dalam spektrum yang sama dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata. Ketiganya saling bertalian dan saling mendukung, serta menaruh daya tarik tersendiri membentuk kegiatan kepariwisataan. Oleh karena itu, telaahan

sosial masyarakat sangat berdasar sehingga menghindari ketidakseimbangan aktivitas kepariwisataan.

A. Pandangan Masyarakat dan Eksklusivitas Ruang

Dinamika sosial yang terjadi tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah untuk kemajuan Pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya. Sebagaimana besar, upaya pemerintah pusat dan daerah mendapat respon dari para pegiat pariwisata/kelompok masyarakat, bahkan terjadi sejak awal pembangunan infrastruktur seperti pembangunan hotel, jalan, area komersil serta pengembangan kawasan TNK Komodo. Kehadiran Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores semakin mendapat perhatian karena dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah mengeksekusi pembangunan di Labuan Bajo. Maka, pemetaan perlu pemetaan dinamika serta narasi elemen masyarakat sehingga meminimalisasi resistensi terhadap upaya pembangunan.

Tabel 3.1 Narasi Stakeholder Kunci Sosial Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo

Kasus/Tahun	Deskripsi	Narasi
Pantai Pede	Kelompok masyarakat (LSM, komunitas, tokoh Agama) menolak pembangunan akomodasi pariwisata	Pembangunan akomodasi pariwisata di Pantai Pede adalah upaya privatisasi ruang publik dan mengganggu ekosistem pesisir Labuan Bajo. Pembangunan akomodasi pariwisata di Pantai Pede membatasi akses masyarakat ke Pantai Pede sebagai ruang publik yang telah dimanfaatkan bertahun-tahun Semua sumber daya bersama (tanah, air, udara, pantai, hutan, dan lain-lain) yang dimiliki secara kolektif, aksesnya terbuka, dan manfaatnya diperuntukkan sebesar-besarnya bagi masyarakat umum. Kelompok yang menolak privatisasi menghendaki Pantai Pede sebagai pantai alami terbuka. Kendati ada retribusi, itu akan dipakai untuk perawatan kebersihan saja. Pantai dibiarkan alami sebagai tempat piknik dan penyelenggaraan acara-acara kerakyatan seperti festival, pentas seni, perlombaan, dan lain-lain.
Penetapan	BOP dianggap	Kehadiran BOP belum menyasar dan

Kasus/Tahun	Deskripsi	Narasi
Badan Otorita Pariwisata LBF	sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang berusaha upaya pembangunan massif di Labuan Bajo demi kepentingan kelompok tertentu	memperhatikan hak-hak komunitas lokal di tengah perkembangan sektor pariwisata. BOP hanya memperkuat pertumbuhan industri pariwisata melalui pengembangan destinasi pariwisata, pembangunan struktur industri pariwisata, manajemen promosi pariwisata, dan pengembangan regulasi serta operasional di bidang pariwisata. Kehadiran BOP membawa berkah pembangunan pariwisata tetapi pada saat yang sama menimbulkan masalah lain seperti konflik agraria, terganggunya masyarakat pada zona inti TNK. BOP belum dapat mendistribusi manfaat sektor pariwisata. BOP tidak berupaya menyelesaikan perampasan hak-hak masyarakat lokal atas tanah dan mata pencarian. Seberapa jauh BOP membawa manfaat dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata? Pembangunan masih cenderung teknokratis ketimbang demokratis. Masyarakat secara umum masih diabaikan dari proses-proses pembangunan.
Pembangunan <i>Jurassic Park</i> di TNK	<i>Jurassic Park</i> berpotensi mengancam sektor pariwisata berbasis alam sebagai produk utama Labuan Bajo	Pembangunan sarana-prasarana yang ditengarai bakal berbasis beton bertentangan dengan habitat Komodo yang ditetapkan sebagai area konservasi nasional. Pembangunan geopark akan menghancurkan bentang alam kawasan Pulau Rinca Pemerintah harus membuka informasi seluas-luasnya terkait dengan pembangunan dan segera melakukan

Kasus/Tahun	Deskripsi	Narasi
		konsultasi publik. Pembangunan dalam TNK komodo adalah upaya modernisasi dan menentang lokalisasi yang selama ini telah terbentuk antara masyarakat lokal dan objek wisata.
Wisata Premium		Premium wisatanya, <i>low budget</i> masyarakatnya (kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi), seperti air, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pemberdayaan sumber daya lokal.

Sumber: Disarikan dari sunspirit for justice and peace dan sumber lain

Dalam konteks pembangunan infrastruktur pariwisata Labuan Bajo, narasi kelompok sosial masyarakat tergambarkan dalam tiga resistensi di atas. Kebijakan pemerintah dipertentangkan dengan narasi yang menitikberatkan pada aspek ekologis, menentang modernitas mendambakan lokalitas, penyelesaian masalah mendasar di Labuan Bajo seperti konflik agraria/tata ruang, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Labuan Bajo.

B. Ringkasan Isu

Perkembangan pariwisata Labuan Bajo dalam pandangan buttler (1990) melalui *Tourism Area Life Cycle* telah melewati tahap eksplorasi (*exploration*) dan keterlibatan (*involvement*). Kini, Labuan Bajo berada pada tahap pembangunan (*development*) pada berbagai lini demi mencapai tujuan atau target kunjungan wisatawan. Upaya pembangunan yang diawali dengan produksi dan penetapan kebijakan mendapat pertentangan dari elemen masyarakat. Beberapa yang mengemuka adalah pembangunan pariwisata Labuan Bajo cenderung mengabaikan aspek ekologis sebagai fondasi daya tarik wisata. Masyarakat menentang adanya modernitas dan mendambakan lokalitas, penyelesaian masalah mendasar di Labuan Bajo seperti konflik agraria/tata ruang, menentang eksklusivitas ruang, serta menuntut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Labuan Bajo, keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan pariwisata Labuan Bajo. Menelaah rentetan masalah sosial serta intensitas narasi masyarakat, maka diskursus sementara menunjukan bahwa pencapaian daur hidup pariwisata Labuan Bajo pada tahap pembangunan belum diawali atau diikuti pembenahan sosial kemasyarakatan seperti keterlibatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar.

3.5 Arahan Direktif

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh Peraturan Presiden, terdapat beberapa amanat yang harus dipenuhi oleh Badan Pelaksana ini. Beberapa target yang dibebankan antara lain sebagai berikut

**Tabel 3.5.1. Program kegiatan Badan Otoritas Pelaksana Labuan Bajo Flores
Tahun 2020-2024**

Sasaran Program (Outcame)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Target					Sumber
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan Kunjungan Wisata dan Wisnus ke Labuan Bajo Flores							RENSTRA Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2024
• Jumlah wisman yang berkunjung ke Labuan Bajo-Flores	Ribu Orang	20	30	60	130	300	RENSTRA Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2024
• Jumlah wisnus yang berkunjung ke Labuan Bajo-Flores	Ribu Orang	50	70	90	170	200	RENSTRA Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2024
Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di Labuan Bajo-Flores							RENSTRA Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2024
• Jumlah investasi pariwisata di Labuan Bajo-Flores	US dollar (\$)	1.000.000	3.000.000	4.000.000	8.000.000	15.000.000	RENSTRA Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2024
• Jumlah usaha pariwisata di Labuan	Usaha	10	10	15	20	25	RENSTRA Kementerian

Bajo-Flores							Pariwisata Tahun 2020- 2024
Tersedianya produk pariwisata di Labuan Bajo-Flores							RENSTRA Kementerian Pariwisata Tahun 2020- 2024
• Jumlah atraksi/daya tarik pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Atraksi	2	3	5	6	8	RENSTRA Kementerian Pariwisata Tahun 2020- 2024
• Jumlah amenities pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Unit	2	3	5	6	8	RENSTRA Kementerian Pariwisata Tahun 2020- 2024
• Jumlah aksesibilitas pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Objek	2	3	5	7	8	RENSTRA Kementerian Pariwisata Tahun 2020- 2024
Meningkatnya kualitas layanan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores							RENSTRA Kementerian Pariwisata Tahun 2020- 2024
• Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap layanan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores	Skala Likert (1 – 4)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	RENSTRA Kementerian Pariwisata Tahun 2020- 2024
Terwujudnya layanan internal berkualitas Badan Pelaksana Otorita Labuan BajoFlores							RENSTRA Kementerian Pariwisata Tahun 2020-

Rencana Strategis BPOLB-F 2021-2030

							2024
• Indeks kepuasan terhadap layanan keuangan, umum, dan komunikasi publik	Skala Likert (1 – 4)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	RENSTRA Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2024
Wisata Premium							Arahan Presiden
KONTEN “value” yang ditawarkan kepada pelanggan, dalam hal ini value of premium tourism dari Labuan Bajo yang akan ditawarkan kepada wisatawan.							Kajian PRPW-UI 2020
KONTEKS cara menawarkan “value” kepada pelanggan atau (dimensi pelayanan) yang dapat berupa responsiveness, reliability, assurance, empathy, tangibility							Kajian PRPW-UI 2020
INFRASTRUKTUR “enabler” untuk merealisasikan konten dan konteks tersebut. Dalam penyediaan infrastruktur ini inovasi menjadi hal yang harus dipertimbangkan							Kajian PRPW-UI 2020

3.6 Potensi dan Tantangan BPOLBF dalam Pengembangan Pariwisata

Posisi Kawasan Pariwisata Labuan Bajo apakah dapat disebut sebagai “*epicentrum*” pembangunan Pulau Flores atau Provinsi Nusa Tenggara Timur? Ataukah hanya khusus sebagai “*epicentrum*” pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur saja? Terlepas dari dua pilihan pertanyaan tersebut, Kawasan Pariwisata Labuan Bajo memiliki keunggulan antara lain:

- a. Mengintegrasikan pengembangan potensi sumberdaya terbarukan (*renewable resources*) di daratan dan lautan secara proporsional yang selama ini cenderung berorientasi di wilayah daratan;
- b. Mengintegrasikan pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo yang terkenal serta didukung dengan wisata baharinya;
- c. Memiliki keragaman potensi sumberdaya ekonomi serta potensi obyek daya tarik wisata dan budaya;
- d. Berada pada lintasan jalur transnasional Banda Aceh – Kupang yang dikenal sebagai sabuk selatan Indonesia.

3.6.1 BPOP LBF dengan Potensinya

- a. Manajer Pengelola Destinasi Pariwisata Kelas Dunia
 - Menyusun pedoman dan arahan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo;
 - Menyusun Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo yang melibatkan multi pihak;
 - Menjembatani perencanaan dan pelaksanaan di wilayah Delineasi Kawasan Pariwisata Labuan Bajo;
 - Koordinator pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo;
 - Mendorong dan mendampingi tumbuh dan berkembangnya lembaga masyarakat lokal sekitar Kawasan Pariwisata Labuan Bajo;
 - Fasilitator dan pendampingan kesiapan masyarakat local sekitar Kawasan Pariwisata Labuan Bajo dalam pengembangan produk-produk wisata, kuliner, *homestay*, tour dan lain-lainnya.

- b. Segitiga Pariwisata Provinsi Bali – Provinsi Nusa Tenggara Barat - Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sebagai taman nasional tertua di Asia Tenggara dan termasuk situs warisan dunia UNESCO, Taman Nasional Komodo memiliki bentang alam seluas 2.200 kilometer persegi yang meliputi 30 pulau. Potensi taman bumi atau *geopark* dari sebuah kawasan geologi yang dimiliki oleh Taman Nasional Komodo tentunya memberikan daya tarik wisata. Potensi *geopark* ini juga dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi

Bali. Kerjasama Geopark antar wilayah; Geopark Batur - Geopark Rinjani - Geopark Tambora – Taman Nasional Komodo – Kaldera Kelimutu). Senyampang geowisata masih berkembang di Indonesia, letupan-letupan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang dihasilkannya wajib diwaspadai Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores.

c. Pengembangan Indonesia sebagai poros maritim dunia

Beragamnya potensi maritim Indonesia tak pelak Labuan Bajo termasuk didalamnya, jika dibandingkan dengan pemanfaatan yang belum optimal niscaya dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Potensi energi kelautan, mineral laut, pelayaran, industri maritim, bioteknologi kelautan, perairan dalam, pertahanan serta wisata bahari sungguh sangat menarik untuk diramu dan disajikan.

3.6.2 BPOP LBF dan Tantangan Pengembangannya

Tantangan, pemulihan pariwisata pasca pandemi, masyarakat, keberlanjutan dll.

a. Illegal Logging

Penebangan kayu yang dilakukan illegal di Kawasan Hutan Nggoreng Bowosie masih sering terjadi. Baik didalam Kawasan Pariwisata Labuan Bajo maupun diluar kawasan hutan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo. Dampak dari kegiatan penebangan liar ini terjadi karena tekanan penduduk semakin besar dan tidak efektifnya system pengamanan hutan. Dampak dari penebangan liar secara langsung akan merusak ekosistem kawasan hutan dan mempengaruhi kelestarian sumberdaya air.

b. Illegal Fishing

Kawasan perairan Selat Sape dan Laut Flores serta Laut Sawu potensial kawasan yang rawan terhadap praktik-praktik *destructive fishing*. Sangat berpeluang terjadi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan bahan peledak dan potassium. Tindakan illegal ini tergolong tindakan yang sangat merugikan kelestarian sumberdaya ikan dan menimbulkan kerusakan ekosistem di kawasan perairan Selat Sape maupun Laut Flores dan Laut Sawu.

c. Pencemaran Perairan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo

Terjadi karena sampah yang masih belum dikelola dengan baik. Perlakuan sampah belum diimbangi tingkat kesadaran masyarakat secara istimewa. Hal yang sama juga terjadi pada perlakuan limbah cair. Disisi lainnya terjadi proses sedimentasi yang berasal dari daratan (*land base pollution*) sebagai dampak dari kondisi aliran sungai yang tidak sehat dan aktifitas penduduk dikawasan pesisir. Selain itu juga pencemaran perairan juga karena minyak dan bahan pelumas yang terbuang serampangan oleh perahu

nelayan, terutama di zona pangkalan perahu nelayan atau perahun wisata. Pencemaran di kawasan perairan harus ditangani secara komprehensif dengan pendekatan hulu – tengah – hilir.

d. Perilaku (birokrasi) yang Tak Responsif Perubahan

Sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi belum menunjukkan jati diri sebagai agen perubahan (*agent of change*). Tantangan terberat yang dihadapi terutama dalam menyiapkan birokrasi yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi organik dan birokrasi dengan baik, yaitu pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan bagi masyarakat. Kreatifitas dan inovasi birokrasi menjadi keniscayaan.

e. Perubahan Pola Pikir dan Perilaku Masyarakat

Tantangan lainnya yang tidak kalah berat adalah pembangunan berbasis masyarakat (*community base development*) yang tidak bisa diabaikan dalam proses pembangunan kawasan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo yakni menyiapkan masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan. Terutama perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menyikapi dinamika pembangunan pariwisata dan ekonomi maritim. Termasuk kesiapan masyarakat dalam proses hilirisasi komoditas, pengembangan ekonomi kreatif dan akulturasi budaya dan cepatnya perkembangan teknologi dan informasi.

f. Inkonsistensi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah

Banyak kasus pembangunan daerah sering terjadi penyimpangan pemanfaatan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Kondisi ini tidak ramah bagi pengembangan investasi pembangunan, karena tidak adanya kepastian hukum. Dampak lainnya pembangunan akan berjalan tanpa arah yang jelas dan dapat menimbulkan kesemrawutan fungsi-fungsi ruang yang akut. Lingkungan hidup tidak nyaman bagi kehidupan.

g. Pemulihan Pariwisata Pasca Pandemi

Membangkitkan sektor pariwisata dari keterpurukan akibat adanya pandemi merupakan salahsatu tugas berat Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Tidak sekedar membuat strategi kebangkitan namun juga memberikan rasa nyaman dan aman kepada pelaku wisata tetapi memastikan bahwa seluruh destinasi wisata berikut aspek yang menghidupinya tetap berlangsung dan berlanjut.



#4

MUATAN RENSTRA BPOLB-F 2021-2030



4.1. Arahan RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden

Visi-Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan Visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Visi Indonesia 2045

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Arahan Presiden

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Sektor pariwisata termasuk dalam Arahan Presiden yaitu :

- a. Pembangunan Infrastruktur, untuk mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- b. Transformasi Ekonomi, dengan pengembangan destinasi unggulan, melalui perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di Destinasi Pariwisata Prioritas, serta penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital, pada sektor kuliner, fashion, kriya, aplikasi dan konten digital, games, film, dan musik. Target yang ditetapkan hingga tahun 2024

adalah peningkatan pendapatan devisa pariwisata mencapai 30 Milyar USD, peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif mencapai 1.846 Triliun Rupiah dan peningkatan nilai transaksi *e-commerce* mencapai 600 Triliun Rupiah.

7 Agenda Pembangunan

Pembangunan sektor pariwisata selain dapat memperkuat ketahanan ekonomi juga dapat menjamin pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan wilayah. Secara total, kontribusi pariwisata dalam penciptaan devisa meningkat dari USD 11,2 miliar pada tahun 2014 menjadi USD 19,3 miliar pada tahun 2018, serta kontribusi sektor pariwisata kepada perekonomian nasional diperkirakan meningkat dari 4,2 persen pada tahun 2015 menjadi 4,8 persen pada tahun 2018. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui akselerasi peningkatan nilai tambah industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital seperti:

- a. Peningkatan nilai ekspor tidak hanya dari produk manufaktur tetapi juga didorong oleh peningkatan ekspor jasa, utamanya jasa perjalanan, melalui peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata. Promosi pariwisata melalui berbagai *event* dan kemudahan akses perjalanan di dalam negeri diharapkan meningkatkan pilihan wisatawan nusantara untuk berwisata di dalam negeri sehingga impor jasa dapat dikelola lebih baik.
- b. Penetapan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas sebagai Proyek Prioritas Strategis (*Mayor Project*) yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

<i>Major Project</i>	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (RP Triliun)	Pelaksanaan
10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, ManadoLikupang, Wakatobi, Raja Ampat, BromoTengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	- Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) - Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kedatangan (2024)	161 (APBN, KPBU, BUMN, Swasta)	Kemenparekraf, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta)

- c. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi melalui peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata.

Dalam lima tahun mendatang, peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Target sasaran sektor pariwisata hingga tahun 2024 meliputi kontribusi PDB pariwisata 5,5 persen, percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas 10 lokasi, jumlah tenaga kerja pariwisata 15 juta orang, nilai devisa pariwisata 30 Milyar USD, serta ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif 3 *database*.

Jenis pariwisata yang akan ditingkatkan diversifikasi mencakup: (1) wisata alam (ekowisata, wisata bahari, wisata petualangan); (2) wisata budaya (*heritage tourism*, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada *Cultural Heritage Regeneration*, dan wisata desa); (3) wisata buatan (*meeting-incentive-conventionexhibition/MICE*, *yacht and cruise*, wisata kebugaran/*wellness tourism*, wisata kesehatan/*medical tourism*, dan wisata olah raga). Pengembangan ketiga jenis pariwisata tersebut juga membuka kesempatan bagi wisatawan untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan pengetahuan, pendidikan dan kesukarelawanan yang terintegrasi dengan kegiatan wisata.

Pengembangan amenitas dan atraksi wisata juga melibatkan industri dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaannya mencakup kerja sama pembiayaan, perbaikan pengelolaan destinasi, penerapan standar layanan, penguatan rantai pasok industri pariwisata, penataan kota sebagai *service hub* pariwisata, penataan kawasan perdesaan untuk mendukung pariwisata, serta pengembangan desa wisata.

Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata difokuskan pada inovasi dan keterpaduan pemasaran, serta penguatan *nation branding*. Berbagai ajang promosi pariwisata akan dijadikan sebagai wahana untuk meningkatkan penghargaan dan perayaan terhadap warisan alam, budaya dan keragaman tatanan sosial masyarakat yang memperkuat regenerasi dan citra bangsa Indonesia. Keterpaduan pemasaran juga melibatkan diaspora Indonesia dalam perayaan kekayaan budaya, termasuk kekayaan kuliner Indonesia melalui diplomasi gastronomi.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar 3.1.



Gambar Error! No text of specified style in document..1 Visi-Misi Presiden, Arahan Presiden, serta 7 Agenda Pembangunan Berdasarkan RPJMN 2020-2024

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

4.2. Arah Renstra Kementerian Pariwisata 2020-2024

Visi-Misi Kemenparekraf/Baparekraf

Kemenparekraf/Baparekraf menetapkan Visi dan Misi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN. Visi Kemenparekraf/Baparekraf selama lima tahun ke depan adalah :

“PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Misi Kemenparekraf/Baparekraf juga harus selaras dengan Misi Presiden Republik Indonesia, sehingga Misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu: (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya ; dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goals) Kemenparekraf/Baparekraf. Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Nilai devisa pariwisata; (2) Kontribusi PDB Pariwisata; (3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif. Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (*quality tourism experience*), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional.

Arah Kebijakan dan Strategi Kemenparekraf/Baparekraf

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 7 arah kebijakan, yaitu:

1. Pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing, dengan 3 strategi: (a) Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatid dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif, (b) Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan, dan (c) Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi;
2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (strategic partnership), dengan 4 strategi: (a) Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial, (b) Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif, (c) Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing, dan (d) Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi, dengan 3 strategi: (a) Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif), (b) Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, dan (c) Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing, dengan 3 strategi: (a) Optimasi kelembagaan maupun kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif, (b) Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dan (c) Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Mewujudkan kreatifitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan, dengan 2 strategi: (a) Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual, dan (b) Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK;
6. Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, dengan 3 strategi: (a) Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing, (b) Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien, dan (c) Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;
7. Mewujudkan birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf yang professional, dengan 1 strategi: Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Target Kinerja Kemenparekraf/Baparekraf

Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditargetkan memberikan Kontribusi yang terus meningkat terhadap ketahanan Ekonomi Indonesia. Nilai Devisa Sektor Pariwisata ditargetkan meningkat dari US\$ 3,3 – 4,8 Miliar di tahun 2020 menjadi US\$ 21,5 - 22,9 Miliar di tahun 2024. Kontribusi PDB Pariwisata terhadap Nasional ditargetkan meningkat bertahap dari 4,0% di tahun 2020 menjadi 4,5% di tahun 2024. Sementara Nilai Ekspor Produk Ekonomi Kreatif ditargetkan meningkat dari US\$ 16,9 Miliar di tahun 2020 menjadi US\$ 19,26 Miliar di tahun 2024. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif ditargetkan meningkat dari Rp. 1.157 Triliun di tahun 2020 menjadi Rp. 1.641 Triliun di tahun 2024.

Dalam mendukung peningkatan kontribusi tersebut, diperlukan juga peningkatan kualitas dan jumlah wisatawan. Jumlah wisatawan mancanegara ditargetkan meningkat dari 2,8 – 4,0 Juta Wisatawan di tahun 2020 menjadi 16 – 17 Juta Wisatawan di tahun 2024. Jumlah spending Wisatawan Mancanegara juga ditargetkan meningkat dari US\$ 1166,67 – 1213,87 di tahun 2020 menjadi US\$ 1345 di tahun 2024. Di sisi lain, pergerakan Wisatawan Nusantara ditargetkan sebesar 120-140 Juta pergerakan di tahun 2020 meningkat menjadi 330-355 Juta pergerakan di tahun 2024.

Daya saing destinasi dan industri pariwisata Nasional ditargetkan meningkat ditandai dengan meningkatnya Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang dipublikasikan oleh World Economic Forum. Indonesia ditargetkan berada di peringkat 36-39 pada tahun 2021 dan meningkat ke peringkat 31-34 di tahun 2023.

Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Rasio usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi dan tersertifikasi ditargetkan meningkat dari 10% di tahun 2020 menjadi 30% di tahun 2024.

Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan meningkat dari US\$ 2 Miliar di tahun 2020 menjadi US\$ 3 Miliar di Tahun 2024. Rasio usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan akses pembiayaan terhadap total usaha pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan mengalami peningkatan dari 1,8% di tahun 2020 menjadi 4,6% di tahun 2024.

Kemenparekraf/Baparekraf juga melindungi kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menargetkan peningkatan jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya dari 1250 produk/jasa di tahun 2020 menjadi 4500 produk/jasa di tahun 2024.

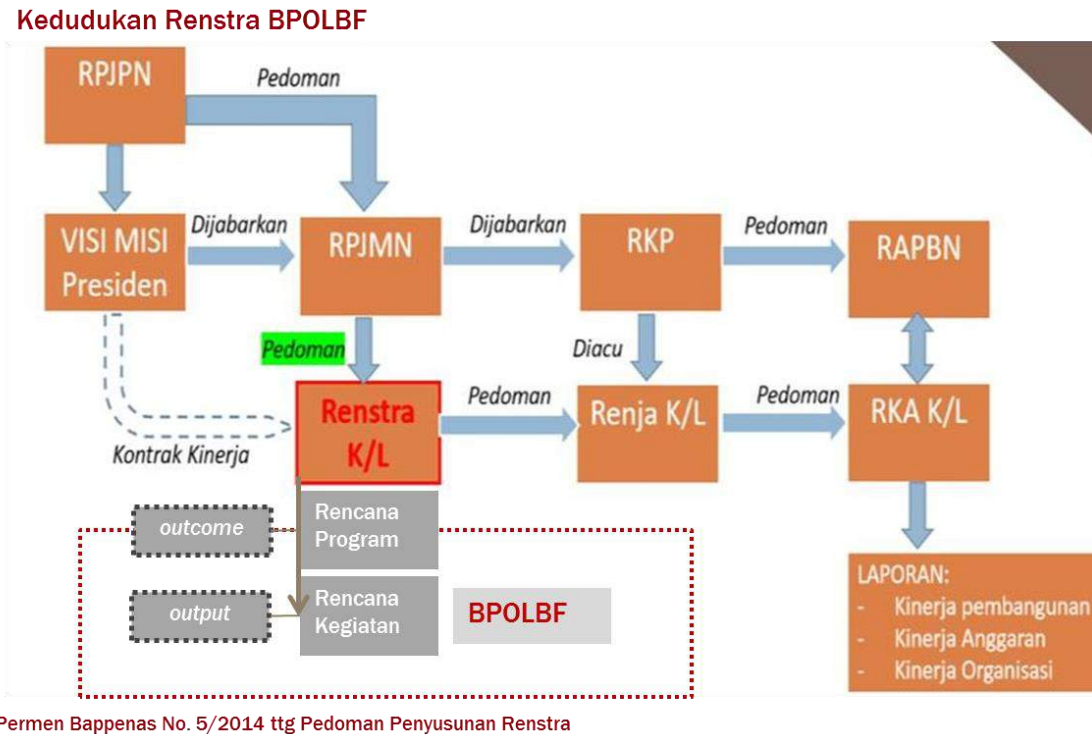
Indeks regulasi berbasis kajian terkait pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan meningkat dari 25 di tahun 2020 menjadi 45 di tahun 2024. Terkait data dan informasi hasil kajian, Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan Jumlah hasil kajian parekraf yang dimanfaatkan/diproduksi meningkat dari 6 dokumen di tahun 2020 menjadi 13 dokumen di tahun 2024.

Pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif tahun 2020-2024, Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan peningkatan jumlah tenaga kerja Pariwisata dari 10 Juta Tenaga Kerja di tahun 2020 menjadi 12 Juta Tenaga Kerja di tahun 2024, jumlah tenaga kerja Ekonomi Kreatif dari 17,25 Juta Tenaga Kerja di tahun 2020 menjadi 19,9 Juta Tenaga Kerja di tahun 2024, dan Jumlah lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata ditargetkan meningkat dari 1500 lulusan di tahun 2020 menjadi 2200 lulusan di tahun 2024.

Terakhir, pada upaya terwujudnya reformasi birokras Kemenparekraf/Barekraf menuju birokrasi yang profesional, Nilai RB Kemenparekraf/Baparekraf ditargetkan naik dari 80 di tahun 2020 menjadi 92,5 di tahun 2024.

4.3. Sasaran Program BPOLBF

Posisi Renstra BPOLF dalam konteks pemenuhan target kementerian Pariwisata adalah rincian output kegiatan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran program. Secara umum digambarkan dalam gambar berikut ini:



Berdasar Renstra Kementerian Pariwisata/Ekonomi Kreatif, terdapat 3 sasaran strategis yang diamanatkan kepada BPOLBF, yaitu

1. Sasaran 3 : meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan
2. Sasaran 5 : tersedianya produk wisata sesuai kebutuhan
3. Sasaran 6: bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional

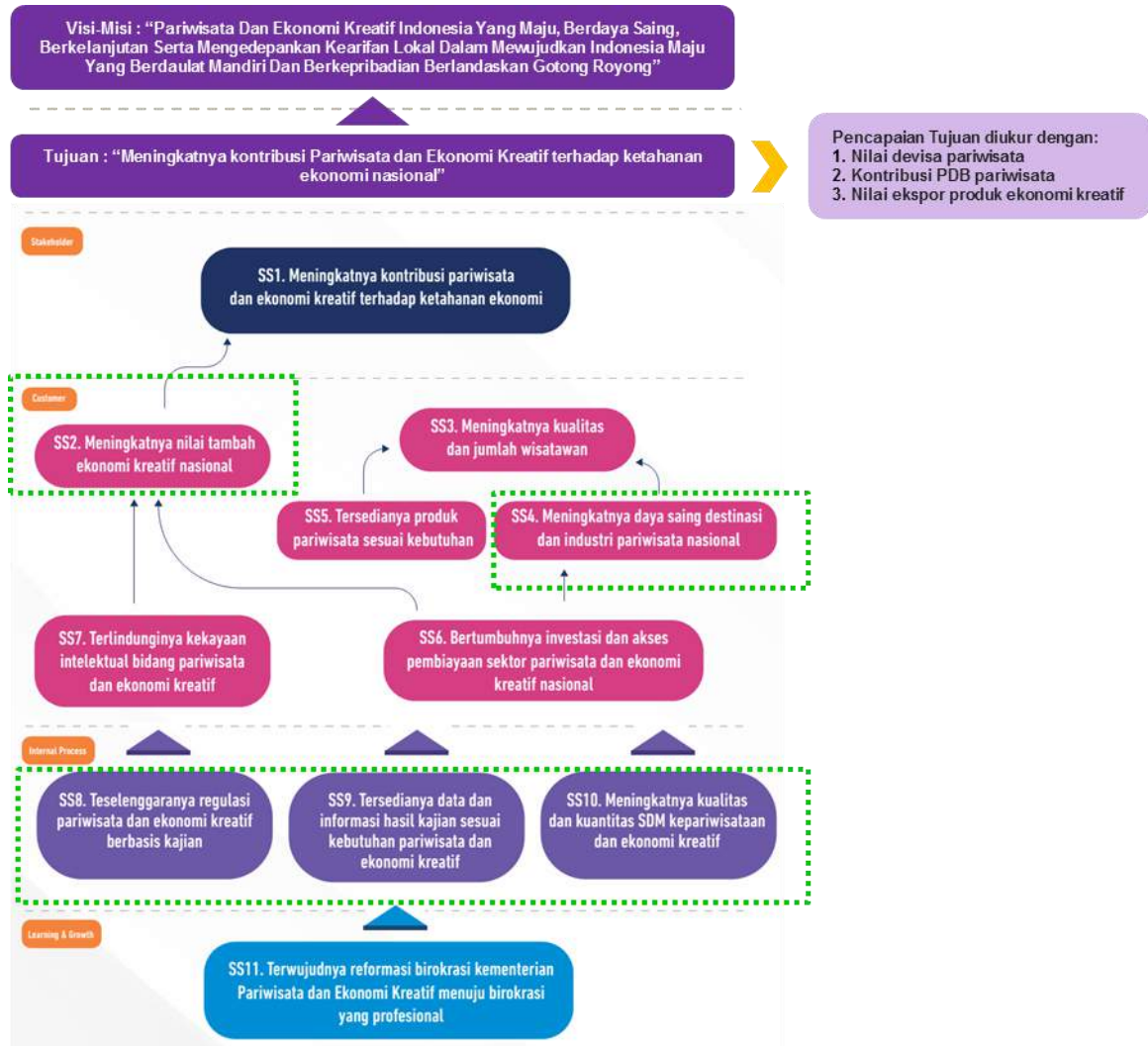
Maka secara khusus, beberapa output kegiatan yang dibebankan kepada BPOLBF adalah sebagai berikut:

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Satuan	Target					Sumber
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan Kunjungan Wisata dan Wisnus ke Labuan Bajo Flores							Disarikan dari RESTRAN Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2024
• Jumlah wisman yang berkunjung ke Labuan Bajo-Flores	Ribu Orang	20	30	60	130	300	
• Jumlah wisnus yang berkunjung ke Labuan Bajo-Flores	Ribu Orang	50	70	90	170	200	
Bertumbuhnya Investasi dan Industri pariwisata di Labuan Bajo-Flores							
• Jumlah Investasi pariwisata di Labuan Bajo-Flores	US dollar (\$)	1.000.000	3.000.000	4.000.000	8.000.000	15.000.000	
• Jumlah usaha pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Usaha	10	10	15	20	25	
Tersedianya produk pariwisata di Labuan Bajo-Flores							
• Jumlah atraksi/daya tarik pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Atraksi	2	3	5	6	8	
• Jumlah amenities pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Unit	2	3	5	6	8	
• Jumlah aksesibilitas pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Objek	2	3	5	7	8	
Meningkatnya kualitas layanan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores							
• Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap layanan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores	Skala Likert (1 – 4)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	
Terwujudnya layanan internal berkualitas Badan Pelaksana Otorita Labuan BajoFlores							
• Indeks kepuasan terhadap layanan keuangan, umum, dan komunikasi publik	Skala Likert (1 – 4)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	
Wisata Premium							Arahan Presiden
KONTEN "value" yang ditawarkan kepada pelanggan, dalam hal ini value of premium tourism dari Labuan Bajo yang akan ditawarkan kepada wisatawan.							Kajian PRPW-UI 2020
KONTEKS cara menawarkan "value" kepada pelanggan atau (dimensi pelayanan) yang dapat berupa responsiveness, reliability, assurance, empathy, tangibility							Kajian PRPW-UI 2020
INFRASTRUKTUR "enabler" untuk merealisasikan konten dan konteks tersebut. Dalam penyediaan infrastruktur ini inovasi menjadi hal yang harus dipertimbangkan							Kajian PRPW-UI 2020

Sumber: disalin dari Rencana Kementerian Tahun 2020-2024 dan Kajian PRPW-UI Tahun 2020

Akan tetapi, jika melihat kondisi umum lembaga serta isu strategis yang dihadapi oleh BPOLBF, output kegiatan tersebut tidak akan mampu menjawab tantangan isu strategis dan amanat direktif yang ditujukan untuk BPOLBF.

Oleh karena itu, dikarenakan penyusunan renstra ini terkait dalam konteks komplementer, dapat dilakukan pendekatan iteratif terhadap dokumen yang menaungi nya. Renstra BPOLBF dapat memberi masukan kepada renstra kementerian pariwisata dengan mengajukan perubahan sasaran program. Hal itu digambarkan melalui gambar berikut:



- BOPLBF sebagai pelaksana dapat juga mendukung sasaran strategis lain seperti SS4 sebagai destinasi pariwisata premium dan SS2 sebagai penciptaan lapangan kerja dan industrialisasi pariwisata.
- Melihat kebutuhan BOPLBF sebagai lembaga baru, perlu dukungan penguatan internal pada SS8, SS9 dan SS10.

Dalam tingkatan lembaga setingkat BPOLBF, target kegiatan berdasar output menjadi fokus Renstra BPOLBF. Jika mempertimbangkan perubahan sasaran strategis, muatan renstra dapat dilihat pada Bab VI laporan ini.

4.4. Proses Bisnis

Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores mempunyai cakupan wilayah pengembangan Kawasan Pariwisata yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32

Tahun 2018 sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Walaupun demikian, tidak berarti mereduksi peran dan tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait. Karena itu tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tetap melekat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki setiap strata pemerintahan.

Campur tangan pemerintahan tetap diperlukan, terutama untuk mengantisipasi dan mencegah hal-hal buruk terhadap pembangunan, serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Termasuk antisipasi dualisme terhadap pembangunan, baik dualisme sosial maupun ekonomi dan regional (Arsyad L, 2015).

Berkaitan dengan hal tersebut maka peran masing-masing aktor pembangunan dalam mewujudkan *good governance* perlu dirumuskan dan dipahami bersama secara baik. Dengan kompleksitas dan cakupan lintas administrative tersebut, dan nantinya melibatkan multi pihak dan multi sector pembangunan dan juga keberagaman programnya, maka BPOPLBF diharapkan dapat menyediakan dan kemampuan membantu menciptakan kerangka kerja organisasi bagi efektifitas pembagian kewenangan dan otoritas pembuatan keputusan dan juga pengembangan pelibatan partisipasi publik.

4.5. Kerangka Kelambagaan

Sebagai suatu Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores harus disiapkan tata kelembagaan yang mengatur peran semua pihak dengan baik. *Rule of the Games* yang akan disiapkan harus membuat nyaman, siapa yang bermain di hulu dan siapa yang bermain di hilir serta tetap membuat lingkungan tetap aman, nyaman dan berkelanjutan. Kelembagaan yang bermakna menciptakan aturan yang menjaga dan melindungi kawasan untuk kemaslahatan semua.

Keberhasilan pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sangat ditentukan oleh kualitas kinerja organisasi pengelola yang secara khusus dibentuk ini. Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagai entitas pariwisata, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan hidup dan spasial, tidak hanya mengembangkan mata rantai nilai dalam merespon dinamika pasar. Namun juga sebagai basis produksi terintegrasi

ekosistem pariwisata dan ekonomi dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumberdaya lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Pertimbangan efektifitas, efisien dan berlanjut, tatakelola Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores harus dapat mengakomodasi kepentingan negara, kebutuhan pasar dan kebutuhan masyarakat. Otorita yang memberikan manfaat masyarakat lokal Labuhan Bajo dan Flores serta Nusa Tenggara Timur.

Opsi kerangka fungsional kelembagaan yang dapat ditawarkan adalah:

- a. Membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kelancaran pengembangan investasi di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo, baik investasi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Sehingga memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi dan evaluasi.
- b. Menjembatani aspirasi tingkat basis baik dari desa atau kawasan-kawasan pertumbuhan yang menintegrasikan beberapa desa. Atau pun dari kelompok-kelompok kecil pelaku pariwisata dan ekonomi yang ada.
- c. Menggalang kerjasama, koordinasi, sinergi sistem yang dinamis, jejaring dan kepemimpinan dalam pengelolaan destinasi.

Sedangkan upaya-upaya penguatannya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Membantu secara kelembagaan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengenal potensi dan kemampuan yang dimiliki. Mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang dihadapi dan mendorong agar memiliki kemampuan merumuskan agenda-agenda penting serta melaksanakannya demi mengembangkan potensi dan menanggulangi/mengantisipasi masalah yang dihadapi.
- b. Memperkuat daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan berbagai macam masukan maupun akses menuju peluang. Penguatan yang dimaksud adalah penguatan modal manusia, modal sumberdaya alam, modal, modal finansial ataupun modal sosial. Penguatan dengan mengoptimalkan fungsi lokal sebagai wadah penerapan, pelestarian dan pengembangan tradisi yang ada seharusnya juga patut dipertimbangkan.
- c. Mendorong terwujudnya tatanan struktural yang mampu melindungi dan mencegah persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang tidak terkendali. Sebagai agen pembangunan kelembagaan ini diharapkan juga dapat mengkolaborasikan secara harmonis lembaga pemerintah, lembaga masyarakat lokal dan juga lembaga lainnya. Tantangannya mungkin dari kapasitas sumberdaya manusia, organisasi dan manajerial yang efektif dan responsif terhadap dinamika perubahan.



#5

QUICK WINS RENCANA AKSI



Rencana Strategis BPOLBF selain memperhatikan aspek *compliance*, juga perlu mempertimbangkan pendekatan Action Plan dengan harapan dapat menghadirkan program-program baru yang tidak bersifat rutinitas dan perjabaran sasaran kegiatan dari dokumen yang menaunginya. Action Plan (Rencana Aksi) ini juga akan dirasa sangat efektif dalam rangka menghadirkan solusi dari isu strategis yang dimiliki oleh lembaga BPOLBF.

Beberapa rencana aksi dituangkan dalam gambar berikut:



Action Plan

“menjawab isu strategis”

ISU STRATEGIS



Peran Otoritatif dan Koordinatif



Objek Pengembangan Multi-skala

QUICK WINS

- Penerapan Perizinan Berbasis Risiko Bagi Kegiatan Investasi
- Penguatan Mekanisme Pengambilan Keputusan Berbasis Kajian/Data
- Perumusan Skema Perencanaan Pembangunan dan Pembiayaan Sektor Kepariwisata di Wilayah Koordinatif

Action Plan

“menjawab isu strategis”

ISU STRATEGIS



Kejelasan Konsepsi Super Premium

QUICK WINS

- Penyiapan Fasilitas Fisik dan Penunjang Bandara
- Peningkatan Kelas Amenitas Menjadi Super Premium
- Perencanaan Amenitas dan Investasi Kelas Super Premium
- Eksplorasi Kuliner Lokal dengan Standar Internasional
- Peningkatan SDM Lokal dengan Kompetensi Layanan Super Premium

Action Plan

“menjawab isu strategis”

ISU STRATEGIS



Pemulihan Akibat Covid 19

QUICK WINS

- Pendataan Komprehensif Dampak Pandemi
- Pemulihan Citra Pariwisata di Labuan Bajo
- Sinkronisasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Penguatan Prinsip Resilience dalam Pengembangan Pariwisata

Action Plan

“menjawab isu strategis”

ISU STRATEGIS



APEC 2022

QUICK WINS

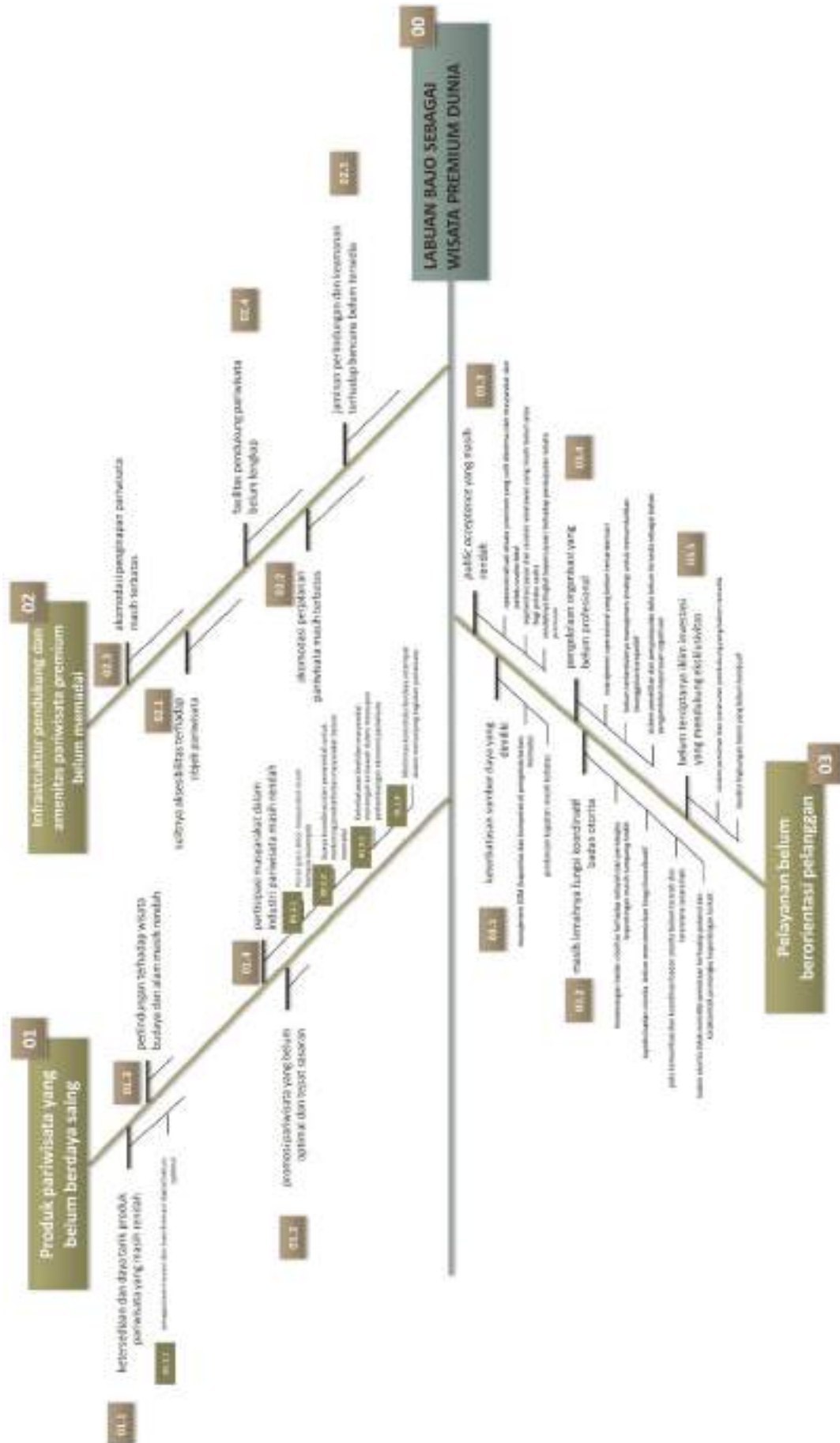
- Penyusunan Rencana Penganggaran
- Penyiapan Amenitas, Ansilaris, Aksesibilitas, Atraksi Wisata (termasuk Venue)
- Penyusunan Rencana Kegiatan



#6

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN





Gambar. Fishbone Renstra BPOLB-F 2020-2024

Rencana Strategis BPOLB-F 2021-2030

Tabel Sasaran Strategis Renstra BPOLB-F

Sasaran Strategis	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Stakeholders
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
BADAN OTORITA PELAKSANA LABUAN BAJO-FLORES									80.700	118.431	149.806	169.453	184.035	
SS3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Meningkatnya kunjungan wisman dan wisnus ke Labuan Bajo-Flores													
	1	Jumlah wisman yang berkunjung ke Labuan Bajo-Flores	Ribu Orang	20	30	60	130	300						
	2	Jumlah wisnus yang berkunjung ke Labuan Bajo-Flores	Ribu Orang	50	70	90	170	200						
	Output:													
	1	Penyusunan <i>bussiness plan</i> pengembangan pariwisata Labuan Bajo-Flores	Dokumen		1									
SS6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Bertumbuhnya investasi dan industri pariwisata di Labuan Bajo-Flores													
	1	Jumlah investasi pariwisata di Labuan Bajo-Flores	US dollar	1.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	8.000.000.000	15.000.000.000						
	2	Jumlah usaha pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Usaha	10	10	15	20	25						
	Output:													
	1	Penyusunan <i>grand design</i> kerja sama dan kemitraan dengan <i>stakeholders</i> pariwisata	Dokumen		1									
	2	Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama dan kemitraan	NSPK			1								
	3	Penyusunan Kajian <i>Zero Waste and Carbon Scheme</i> Pariwisata	Dokumen			1								BOP LBF, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Strategis BPOLB-F 2021-2030

Sasaran Strategis	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Stakeholders
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
														Provinsi, Bappeda Provinsi, Dinas Pariwisata.
	4	Penyusunan <i>Masterplan Eco Tourism</i> Labuhan Bajo Flores	Dokumen				1							BOP LBF, Bappeda Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi.
	5	Penyusunan <i>Masterplan</i> Wisata Bawah Laut (Air) Labuhan Bajo Flores	Dokumen					1						BOP LBF, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Bappeda Provinsi, Dinas Pariwisata.
SS5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan	Tersedianya produk pariwisata di Labuan Bajo-Flores													
	1	Jumlah atraksi/daya tarik pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Atraksi	2	3	5	6	8						
	2	Jumlah amenitas pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Unit	2	3	5	6	8						
	3	Jumlah aksesibilitas pariwisata di Labuan Bajo-Flores	Objek	2	3	5	7	8						
	Output:													
	1	Penyusunan <i>masterplan</i> pengembangan pariwisata Labuan Bajo-Flores	Dokumen		1									
	2	Penyusunan <i>zoning map</i> fasilitas wisata	Dokumen			1								
	3	Penyusunan DED jalur wisata	Dokumen			1	1							
SS11. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional	Meningkatnya kualitas layanan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores													
	1	Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores	Skala Likert (1 - 4)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00						

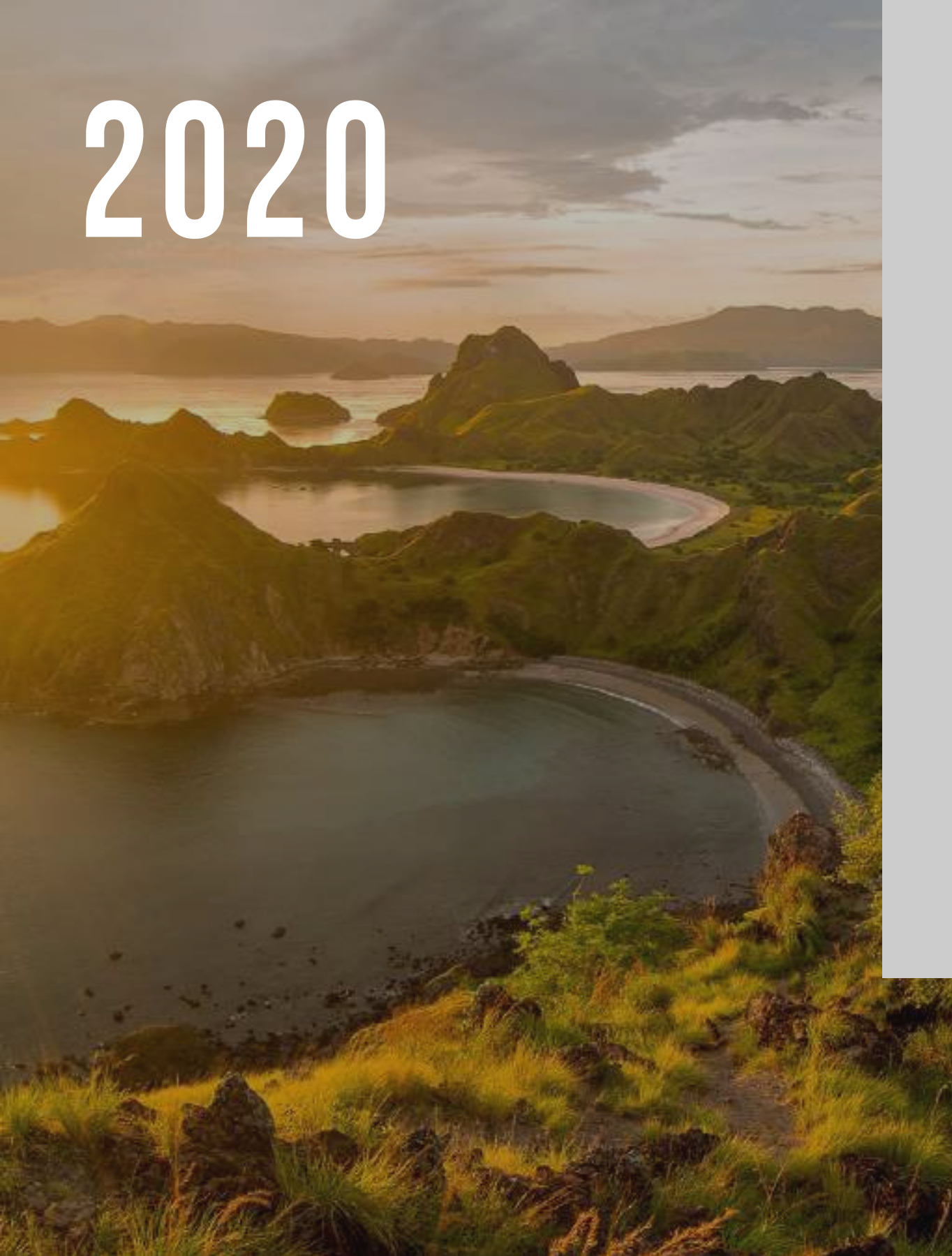
Rencana Strategis BPOLB-F 2021-2030

Sasaran Strategis	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Stakeholders
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Output:												
	1 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) BOP Labuan Bajo-Flores			1									
	2 Penyusunan petunjuk teknis tata kelola birokrasi BOP Labuan Bajo-Flores			1									
	3 Penyusunan <i>Stakeholder Engagement Plan</i> berbasis <i>focus group</i>			1									
	4 Penyusunan pedoman penilaian kinerja BOP Labuan Bajo-Flores			1									
SS11. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional	Terwujudnya layanan internal berkualitas Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores												
	1 Indeks kepuasan terhadap layanan keuangan, umum, dan komunikasi publik	Skala Likert (1 - 4)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00						
	Output:												
	1 Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan monitoring evaluasi kegiatan tahunan		1	1	1	1	1						
	2 Penyusunan audit internal manajemen mutu		1	1	1	1	1						
SS8. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian	Tersedianya regulasi pariwisata premium Labuan Bajo-Flores												
	1 Jumlah regulasi pariwisata berbasis kajian	Dokumen											
	Output:												

Rencana Strategis BPOLB-F 2021-2030

Sasaran Strategis	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Stakeholders
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	1 Penyusunan pedoman pelaksanaan dan pengawasan pariwisata premium Labuan Bajo-Flores	NSPK			1								
SS9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif	Tersedianya data dan informasi pariwisata premium Labuan Bajo-Flores												
	1 Jumlah data dan informasi pariwisata	Data dan Informasi											
	Output:												
	1 Pengembangan sistem informasi pariwisata premium Labuan Bajo-Flores	Sistem Informasi	1	1	1	1	1						
SS10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan premium Labuan Bajo-Flores	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan premium Labuan Bajo-Flores												
	1 Jumlah SDM kepariwisataan premium yang berstandar internasional	Orang											
	Output:												
	1 Pelaksanaan <i>capacity building</i> SDM kepariwisataan premium Labuan Bajo-Flores	Kegiatan	2	2	2	2	2						
SS4. Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional	Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata Labuan Bajo-Flores												
	1 Jumlah destinasi pariwisata yang siap dipasarkan	Lokasi											
	Output:												
	1 Penyusunan perangkat tata kelola destinasi pariwisata	Dokumen			1								

2020



DIBUAT ATAS KERJASAMA :



LAP